MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja							Keuangan			
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif	Indeks Pelayanan Publik	1	Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	0	0	0.00				

No	Sasaran Strategis Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	Kinerja							Keuangan			
			No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	Level	0	0	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	41.519.750	27.583.040	66.43
					Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	0	0	0.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	33.551.920	26.018.130	77.55
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	32.712.832	4.846.000	14.81
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	57.350.020	41.788.156	72.87
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	20.910.000	14.200.982	67.91
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	70.051.780	25.965.500	37.07
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	45.059.488	13.317.961	29.56
			3	Meningkatnya kinerja Inspektorat	IKM Inspektorat	Indeks	0	0	0.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.404.054.597	5.068.705.137	68.46

B. FAKTOR PENDUKUNG

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan faktor pendukungnya : Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (telah dibentuk Tim Satgas SPIP di Level Pemda dan Tim Pengelola Risiko di Level Perangkat Daerah), Telah dilaksanakan monitoring terhadap implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Semester II Tahun Anggaran 2025 pada Triwulan I Tahun 2026, Telah dilakukan penyesuaian dokumen RTP Tahun 2026 sebagai tindak lanjut atas perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Telah dilakukan pendampingan dalam penilaian mandiri SPIP dan Dukungan pembinaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam penguatan implementasi SPIP di pemerintah daerah serta pelaksanaan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP juga telah terlaksana.

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. **Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III) dengan faktor pendukungnya adalah Ketersediaan dokumen dan data dukung yang diperlukan dalam proses penilaian kapabilitas APIP (Telah dilaksanakannya proses penilaian Kapabilitas APIP Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tanggal 2 Februari sampai dengan 7 Maret 2026 serta asistensi peningkatan kapabilitas APIP triwulan I tahun 2026 pada tanggal 6 Maret 2026), telah dilaksanakan juga Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tanggal 17-30 Juni 2026 dan Komitmen pimpinan dan aparatur pengawasan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan internal.**
2. **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III) dengan faktor pendukungnya adalah telah dilaksanakan sosialisasi peningkatan pemahaman anti korupsi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada tenggal 6 Mei 2026 dan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan upaya pencegahan korupsi, serta Dukungan kebijakan dan program penguatan integritas di lingkungan pemerintah daerah.**

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III dengan Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan faktor pendukungnya : Adanya partisipasi pengguna layanan dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Telah dilaksanakan pengisian survei kepuasan masyarakat oleh pengguna layanan Inspektorat sejak Triwulan I dan masih berlanjut di Triwulan III).

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan faktor penghambatnya : Keterbatasan pemahaman aparatur mengenai SPIP dan mekanisme penilaian mandiri, Keterbatasan ketersediaan data dan dokumen pendukung, baik karena belum terdokumentasi dengan baik maupun belum diperbarui, sehingga proses verifikasi penilaian menjadi lebih lama, Kesibukan dan keterbatasan waktu pejabat atau tim SPIP perangkat daerah, yang menyebabkan koordinasi, konsultasi, dan penyelesaian penilaian mandiri tidak dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. **Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III) dengan faktor penghambatnya adalah Proses penilaian masih berlangsung sehingga hasil resmi penilaian Kapabilitas APIP belum dapat ditetapkan pada Triwulan II, Terdapat perubahan metode dan kriteria penilaian sesuai regulasi terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sehingga terjadi penyesuaian dalam proses penilaian dan berdasarkan surat edaran dari BPKP terdapat potensi penurunan nilai Kapabilitas APIP karena perbedaan kesetaraan level dibandingkan dengan regulasi sebelumnya.**
2. **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III) dengan faktor penghambatnya adalah proses pendampingan penilaian mandiri baru dilaksanakan pada Triwulan II dan Kebutuhan pengumpulan dan verifikasi data dukung dari perangkat daerah sebagai bagian dari proses penilaian baru dikumpukan di Triwulan II sehingga Triwulan III baru dapat dilakukan proses penilaiannya oleh BPKP.**

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III dengan Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan faktor penghambatnya : Proses pengumpulan data survei masih berlangsung hingga Triwulan III dan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara periodik dan hasil akhir baru dapat diperoleh pada akhir tahun setelah seluruh data survei terkumpul.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan

Belum tersedia data capaiannya di Triwulan III dengan indikatornya adalah Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah melakukan koordinasi dan pematuan atas penialain SPIP dengan BPKP.

Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. **Level Kapabilitas APIP (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Menindaklanjuti hasil penilaian Kapabilitas APIP yang akan ditetapkan oleh BPKP, Melakukan identifikasi area perbaikan berdasarkan hasil evaluasi penilaian kapabilitas APIP dan Menyusun langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2026 (sudah dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman ke APIP oleh Inspektur di Triwulan I dan penilaian mandiri di Triwulan II).**
2. **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III) dengan tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah.**

Meningkatnya kinerja Inspektorat

Belum tersedia data capaiannya sampai dengan Triwulan III dengan Indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat dan tindak lanjut di Triwulan berikutnya adalah Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi permasalahan layanan dan merumuskan solusi perbaikan pelayanan, dan Menyusun rekomendasi peningkatan kualitas layanan berdasarkan hasil survei dan pembahasan FGD.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DIDIK ROPIYADI, S.STP, M.H
Jabatan Pelapor : Sekretaris
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kinerja Inspektorat	IKM Inspektorat	1	Tercapainya tertib pelaporan administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	%	100	100	100.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.404.054.597	5.068.705.137	68.46
					Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat	Angka	0	0	0.00				
					Nilai SAKIP Inspektorat	Angka	81	80.10	98.89				
					Jumlah Inovasi Inspektorat	Angka	1	1	100.00				
			1.1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	%	60	100	166.67	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.927.000	1.470.000	76.28

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	2	2	100.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.796.521.699	4.734.366.830	69.66
			1.3	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase layanan administrasi BMD	%	60	80	133.33	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	462.500	235.000	50.81
			1.4	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	143.080.000	101.515.936	70.95
			1.5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.032.810	42.109.850	32.63

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.6	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	%	50	50	100.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.966.338	114.618.376	65.51
			1.7	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	%	55	55.56	101.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.382.350	74.389.145	62.84
			1.8	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	%	0	0	0.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.681.900	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya jadwal penyusunan dokumen, data pendukung serta koordinasi antara unsur perencana dan pelaksana kegiatan. Penyusunan dan evaluasi dokumen juga dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perencanaan dan penganggaran yang berlaku.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi keuangan didukung oleh mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan secara rutin serta monitoring realisasi anggaran yang dilakukan setiap bulan bersamaan dengan rapat monitoring kegiatan. Mekanisme tersebut memungkinkan perkembangan penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan diketahui secara berkala.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Penatausahaan dan pengamanan BMD telah dilaksanakan melalui rekonsiliasi BMD secara berkala. Monitoring administrasi BMD juga didukung oleh koordinasi antara pengurus barang dan pihak terkait.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi kepegawaian dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, didukung pemutakhiran data kepegawaian serta koordinasi dengan BKPSDM. Monitoring kinerja pegawai juga dilakukan secara berkala.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelayanan administrasi umum dilaksanakan untuk menunjang operasional kantor dan kebutuhan pelaksanaan tugas Inspektorat. Kebutuhan kegiatan dipantau melalui monitoring rutin dan rapat evaluasi bulanan.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa penunjang dilaksanakan secara rutin untuk menjamin kelancaran operasional kantor. Monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dilakukan setiap bulan sehingga kebutuhan layanan dapat dipantau.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan BMD dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kondisi barang/aset. Monitoring kegiatan dan anggaran dilakukan secara bulanan sehingga kebutuhan pemeliharaan dapat diidentifikasi dan dijadwalkan.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan telah memperoleh alokasi anggaran melalui Perubahan APBD Tahun 2026 dan kebutuhan laptop, AC, dan printer telah ditetapkan sebagai bagian dari sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah

Target: 100% | Realisasi: 100%

Faktor Penghambat:
Sampai dengan Triwulan III tidak terdapat hambatan yang signifikan. Namun demikian, potensi keterlambatan dapat terjadi apabila terdapat keterlambatan penyampaian data atau dokumen pendukung dari pelaksana kegiatan.

2. Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat

Target: 47 | Realisasi: Belum Tersedia Data

Faktor Penghambat:
Hasil penilaian kematangan organisasi sampai dengan Triwulan III belum tersedia karena proses penilaian masih berlangsung, sehingga nilai realisasi belum dapat dicantumkan.

3. Nilai SAKIP Inspektorat

Target: 81 | Realisasi: 80,1

Faktor Penghambat:
Nilai realisasi masih berada di bawah target tahunan, yang menunjukkan masih terdapat aspek dalam penerapan SAKIP yang perlu diperkuat dan ditingkatkan kualitasnya.

4. Jumlah Inovasi Inspektorat

Target: 1 | Realisasi: 1

Faktor Penghambat:

Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pemenuhan target inovasi. Namun, keberlanjutan pemanfaatan dan pengembangan inovasi tetap perlu dijaga.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tidak terdapat hambatan yang signifikan sampai dengan Triwulan III sehingga target setahun telah terpenuhi

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sebagian output administrasi keuangan bersifat bulanan, semesteran dan tahunan sehingga realisasi output mengikuti periode pelaporannya.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan di Triwulan III sehingga target terpenuhi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pencapaian indikator kegiatan.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Beberapa sub kegiatan memiliki output yang bersifat situasional atau semesteran sehingga realisasinya tidak selalu sama dengan periode berjalan.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagian indikator output menggunakan laporan semesteran, sehingga sampai Triwulan III baru sebagian laporan yang dapat direalisasikan sesuai periode pelaporan.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sebagian pemeliharaan kendaraan dan peralatan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan, sehingga belum seluruh target unit memerlukan atau telah mendapatkan pemeliharaan sampai Triwulan III.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan baru tersedia setelah penetapan Perubahan APBD Tahun 2026 pada Triwulan III, sehingga tahapan pelaksanaan pengadaan baru dapat dilakukan sesuai jadwal pada Triwulan IV. Sampai dengan Triwulan III belum terdapat realisasi karena pelaksanaan kegiatan memang direncanakan pada periode berikutnya.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah

Target: 100% | Realisasi: 100%

Rencana Tindak Lanjut:
Mempertahankan mekanisme monitoring dan koordinasi secara berkala serta memastikan seluruh laporan kinerja administrasi dapat diselesaikan dan disampaikan tepat waktu sampai dengan akhir tahun.

2. Nilai Kematangan Organisasi Inspektorat

Target: 47 | Realisasi: Belum Tersedia Data

Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan pemantauan secara berkala terhadap proses penilaian, melengkapi dokumen/data dukung yang masih diperlukan, serta menindaklanjuti hasil penilaian setelah hasil resmi tersedia.

3. Nilai SAKIP Inspektorat

Target: 81 | Realisasi: 80,1

Rencana Tindak Lanjut:
Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP, memperbaiki komponen yang masih belum optimal, serta meningkatkan kualitas keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja.

4. Jumlah Inovasi Inspektorat

Target: 1 | Realisasi: 1

Rencana Tindak Lanjut:
Mempertahankan implementasi SAPA GRAF, meningkatkan pemanfaatannya serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas inovasi dalam mendukung pelayanan dan penguatan integritas. Selain itu, juga perlu dipersiapkan inovasi SIMHP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan) untuk inovasi di Tahun 2027.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Mempertahankan koordinasi dan mekanisme penyusunan serta evaluasi dokumen secara tepat waktu dan melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Melanjutkan monitoring penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan setiap bulan serta memastikan seluruh dokumen administrasi keuangan tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Menyelesaikan rekonsiliasi Triwulan III di Triwulan IV dan memastikan seluruh administrasi BMD terpenuhi sesuai target.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Mempertahankan kualitas dan ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian serta memastikan seluruh dokumen kepegawaian terpenuhi sampai akhir tahun.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Mempertahankan pelayanan administrasi umum dan menyelesaikan output yang masih menjadi target pada Triwulan IV sesuai kebutuhan dan jadwal pelaksanaan.

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Memastikan seluruh layanan penunjang tetap tersedia dan menyelesaikan laporan periode berikutnya pada Triwulan IV.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Melakukan identifikasi ulang terhadap kondisi BMD, menjadwalkan pemeliharaan terhadap aset yang masih menjadi target dan menyelesaikan pemeliharaan yang diperlukan pada Triwulan IV.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Melaksanakan tahapan pengadaan laptop, AC, dan printer pada Triwulan IV sesuai kebutuhan, spesifikasi, ketersediaan anggaran, dan ketentuan pengadaan barang/jasa. Selanjutnya dilakukan pemantauan progres pengadaan, penerimaan barang, serta penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran sampai kegiatan selesai.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Sekretaris

DIDIK ROPIYADI, S.STP, M.H
198312252002121001

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	45.97	53.45	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	41.519.750	27.583.040	66.43
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	90	90	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	27.014.750	19.323.040	71.53

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	86	86	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14.505.000	8.260.000	56.95

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tindak lanjut didukung oleh mekanisme monitoring yang dilakukan secara berkala. Setiap triwulan dilaksanakan rapat monitoring persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, sehingga perkembangan penyelesaian rekomendasi dapat diketahui, permasalahan dapat diidentifikasi dan objek pengawasan yang belum menyelesaikan rekomendasi dapat diberikan perhatian lebih lanjut. Selain itu, pengelolaan tindak lanjut juga didukung oleh pemantauan melalui mekanisme administrasi tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Capaian tindak lanjut masih belum memenuhi target karena penyelesaian sebagian rekomendasi sangat bergantung pada tindak lanjut dari perangkat daerah/objek pengawasan. Beberapa rekomendasi membutuhkan proses penyelesaian lebih lanjut, terutama rekomendasi yang berkaitan dengan administrasi, keuangan maupun penyelesaian kewajiban tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi adanya penugasan mandatori yang harus dilaksanakan di luar rencana awal.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan perangkat daerah/objek pengawasan yang masih memiliki rekomendasi belum selesai, melakukan pemetaan rekomendasi berdasarkan tingkat penyelesaian dan permasalahannya, serta memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang berpotensi menghambat pencapaian target tindak lanjut. Monitoring akan dilanjutkan melalui rapat triwulanan dan pemantauan secara berkala sampai akhir tahun.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	90	90	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	27.014.750	19.323.040	71.53
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	210.000	16.80
			1.2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100.00	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.400.000	6.342.040	99.09

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	Reviu Laporan Kinerja	750.000	700.000	93.33
			1.4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100.00	Reviu Laporan Keuangan	4.600.000	4.448.000	96.70
			1.5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	5	5	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	13.913.750	7.623.000	54.79
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	86	86	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	14.505.000	8.260.000	56.95

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2.1	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1	100.00	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	900.000	600.000	66.67
			2.2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	18	18	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13.605.000	7.660.000	56.30

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Reviu Laporan Keuangan

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Koordinasi internal dan komitmen antar pihak mendukung terbentuknya kesepakatan pelaksanaan reviu telaah intern.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tersedianya data rekomendasi hasil pemeriksaan serta adanya mekanisme monitoring secara berkala. Rapat monitoring tindak lanjut setiap triwulan menjadi sarana untuk mengevaluasi perkembangan penyelesaian rekomendasi.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penanganan penyelesaian kerugian telah dilaksanakan dan didukung koordinasi dengan pihak terkait.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan penugasan didukung PKPT, penjadwalan melalui RO bulanan dan monitoring progres pelaksanaan kegiatan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Asistensi Pemeriksaan Pendahuluan dan Terinci BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Reviu Laporan Keuangan

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Triwulan I dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sebagian rekomendasi belum dapat diselesaikan oleh objek pengawasan sampai dengan Triwulan III sehingga dokumen hasil monitoring belum seluruhnya mencapai target tahunan.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelesaian kerugian negara/daerah membutuhkan proses dan tindak lanjut dari pihak yang bertanggung jawab sehingga penyelesaiannya tidak seluruhnya dapat dilakukan dalam satu periode. **Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu** **Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dalam berjalan lancar sesuai tergetnya di Triwulan III**

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

1. **Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan**
2. **Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Kinerja pada Perangkat Daerah lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan berikutnya**

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah pelaksanaan Asistensi penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2026 sehingga target setahun atas Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dapat terpenuhi

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di IV atas tindak lanjut yang belum selesai di Triwulan III menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Reviu Laporan Keuangan

Mempertahankan ketepatan waktu pelaksanaan reviu dan meningkatkan kualitas hasil reviu.

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti kesepakatan sesuai rencana dan mempertahankan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Meningkatkan koordinasi dan pemantauan terhadap objek yang memiliki rekomendasi belum selesai, menyusun daftar prioritas rekomendasi yang harus segera diselesaikan dan melakukan evaluasi progres pada monitoring triwulan berikutnya.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melakukan monitoring dan koordinasi secara intensif terhadap proses penyelesaian kerugian negara/daerah yang masih berjalan sampai diperoleh penyelesaian sesuai ketentuan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pada Triwulan IV dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, kapasitas tim serta hasil evaluasi pada rapat RO bulanan.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Jabatan Pelapor : Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	73.19	85.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	57.350.020	41.788.156	72.87

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	95	87	91.58	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.641.920	6.990.000	39.62
			2.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	63	63	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39.708.100	34.798.156	87.63

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	20.910.000	14.200.982	87.63
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	8.230.382	82.30
			2.2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	100	100	100.00	Pendampingan dan Asistensi	10.910.000	5.970.600	54.73

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	8.230.382	82.30
			2.2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	100	100	100.00	Pendampingan dan Asistensi	10.910.000	5.970.600	54.73

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tindak lanjut didukung oleh mekanisme monitoring yang dilakukan secara berkala. Setiap triwulan dilaksanakan rapat monitoring persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, sehingga perkembangan penyelesaian rekomendasi dapat diketahui, permasalahan dapat diidentifikasi dan objek pengawasan yang belum menyelesaikan rekomendasi dapat diberikan perhatian lebih lanjut. Selain itu, pengelolaan tindak lanjut juga didukung oleh pemantauan melalui mekanisme administrasi tindak lanjut.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Faktor Pendukung:
Komitmen perangkat daerah dalam mengikuti pendampingan dan asiatensi, dukungan tim Inspektorat serta koordinasi yang berjalan baik menjadi faktor utama tercapainya target. Pelaksanaan pendampingan juga dipantau melalui mekanisme monitoring kegiatan secara berkala.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 Pendampingan dan Asistensi Kegiatan pendampingan dan asistensi telah dilaksanakan secara intensif kepada perangkat daerah. Koordinasi antara tim Inspektorat dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan agenda reformasi birokrasi, pengendalian intern, integritas dan kebutuhan pengawasan lainnya. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 Pendampingan dan Asistensi Kegiatan pendampingan dan asistensi telah dilaksanakan secara intensif kepada perangkat daerah. Koordinasi antara tim Inspektorat dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan agenda reformasi birokrasi, pengendalian intern, integritas dan kebutuhan pengawasan lainnya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Capaian tindak lanjut masih belum memenuhi target karena penyelesaian sebagian rekomendasi sangat bergantung pada tindak lanjut dari perangkat daerah/objek pengawasan. Beberapa rekomendasi membutuhkan proses penyelesaian lebih lanjut, terutama rekomendasi yang berkaitan dengan administrasi, keuangan maupun penyelesaian kewajiban tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi adanya penugasan mandatori yang harus dilaksanakan di luar rencana awal.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Faktor Penghambat:
Tidak terdapat hambatan signifikan terhadap pencapaian indikator program.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sebagian pelaksanaan pengawasan internal mengalami penyesuaian jadwal karena adanya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan belum dapat dimulai atau diselesaikan sesuai jadwal awal.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Pendampingan dan Asistensi **Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan** **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** **Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III** **Pendampingan dan Asistensi** **Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan**

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan perangkat daerah/objek pengawasan yang masih memiliki rekomendasi belum selesai, melakukan pemetaan rekomendasi berdasarkan tingkat penyelesaian dan permasalahannya, serta memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang berpotensi menghambat pencapaian target tindak lanjut. Monitoring akan dilanjutkan melalui rapat triwulanan dan pemantauan secara berkala sampai akhir tahun.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Rencana Tindak Lanjut:
Mempertahankan capaian 100% dan meningkatkan kualitas pendampingan, asistensi, verifikasi serta monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Menyelesaikan aktivitas pendampingan/asistensi yang masih tersisa pada Triwulan IV dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Menyelesaikan aktivitas pendampingan/asistensi yang masih tersisa pada Triwulan IV dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M
197402061999032008

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
Jabatan Pelapor : Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	95	87	91.58	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	17.641.920	6.990.000	39.62
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	1.200.000	96.00
			1.2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	22	22	100.00	Reviu Laporan Kinerja	2.340.000	2.310.000	98.72
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	5	2	40.00	Pengawasan Desa	13.550.920	3.480.000	25.68

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	9	9	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400.000	0	0
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	63	63	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39.708.100	34.798.156	87.63
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	19	19	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	39.708.100	34.798.156	87.63

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
3	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	3	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	8.230.382	82.30
			3.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	10.000.000	8.230.382	82.30
			4	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	100	100	100.00	Pendampingan dan Asistensi	10.910.000	5.970.600	54.73

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4.1	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.525.000	4.345.500	50.97
			4.2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	985.000	375.000	38.07
			4.3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.400.000	1.250.100	89.29

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pengawasan berpedoman pada PKPT dan dikendalikan melalui rapat RO bulanan yang membahas penugasan yang telah selesai serta rencana penugasan bulan berikutnya.

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Kegiatan pengawasan desa telah masuk dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaannya tetap dipantau melalui rapat RO bulanan.

Kerjasama Pengawasan Internal

Koordinasi internal dan komitmen antar pihak mendukung terbentuknya kesepakatan pelaksanaan reviu telaah intern.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan penugasan didukung PKPT, penjadwalan melalui RO bulanan dan monitoring progres pelaksanaan kegiatan.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pendampingan dan asistensi telah dilaksanakan secara intensif kepada perangkat daerah. Koordinasi antara tim Inspektorat dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan agenda reformasi birokrasi, pengendalian intern, integritas dan kebutuhan pengawasan lainnya.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat difasilitasi oleh tim Inspektorat.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Adanya koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta dukungan tim pelaksana memungkinkan seluruh target perangkat daerah mendapatkan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Koordinasi dengan perangkat daerah berjalan baik dan pendampingan penegakan integritas telah dilakukan melalui monitoring pelaporan LHKAN dan pembangunan Zona Integritas.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sebagian pelaksanaan pengawasan internal mengalami penyesuaian jadwal karena adanya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan belum dapat dimulai atau diselesaikan sesuai jadwal awal.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga pelaksanaannya di Triwulan II dapat berjalan lancar sampai dengan Triwulan III

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sebagian besar laporan pengawasan sudah dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan sebagian lainnya tidak membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada hambatan yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan belum selesai sampai Triwulan III karena proses penyusunan PPBR masih berlangsung.

Pendampingan dan Asistensi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pencapaian target.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Memprioritaskan penyelesaian penugasan yang masih tersisa, mengoptimalkan pembagian jadwal tim dan melakukan monitoring penyelesaian LHP sampai akhir tahun.

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melakukan penjadwalan ulang melalui rapat RO, menetapkan prioritas penyelesaian pengawasan desa yang tertunda, mengoptimalkan sumber daya tim pemeriksa serta melakukan monitoring progres penyelesaian setiap bulan sampai akhir tahun.

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti kesepakatan sesuai rencana dan mempertahankan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pada Triwulan IV dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, kapasitas tim serta hasil evaluasi pada rapat RO bulanan yangtelah disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru termasuk penghapusan reviu renja yang akan berdampak dalam pengurangan target di Bidang AAP (PPUPD).

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan **Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)**
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan **Mempercepat penyelesaian proses penyusunan PPBR dan rekomendasi kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan pada Triwulan IV.**
Pendampingan dan Asistensi **Menyelesaikan aktivitas pendampingan/asistensi yang masih tersisa pada Triwulan IV dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah **Mempertahankan cakupan pendampingan dan meningkatkan kualitas asistensi berdasarkan kebutuhan perangkat daerah.**
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi **Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pendampingan dan meningkatkan kualitas rekomendasi perbaikan reformasi birokrasi.**
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas **Mempertahankan cakupan pendampingan dan meningkatkan monitoring atas tindak lanjut hasil pendampingan penegakan integritas.**

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
197402061999032008

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			4.1	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8.525.000	4.345.500	50.97
			4.2	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	985.000	375.000	38.07
			4.3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	50	50	100.00	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.400.000	1.250.100	89.29

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pengawasan berpedoman pada PKPT dan dikendalikan melalui rapat RO bulanan yang membahas penugasan yang telah selesai serta rencana penugasan bulan berikutnya.

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Kegiatan pengawasan desa telah masuk dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaannya tetap dipantau melalui rapat RO bulanan.

Kerjasama Pengawasan Internal

Koordinasi internal dan komitmen antar pihak mendukung terbentuknya kesepakatan pelaksanaan reviu telaah intern.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan penugasan didukung PKPT, penjadwalan melalui RO bulanan dan monitoring progres pelaksanaan kegiatan.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pendampingan dan asistensi telah dilaksanakan secara intensif kepada perangkat daerah. Koordinasi antara tim Inspektorat dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan agenda reformasi birokrasi, pengendalian intern, integritas dan kebutuhan pengawasan lainnya.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat difasilitasi oleh tim Inspektorat.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Adanya koordinasi dengan seluruh perangkat daerah serta dukungan tim pelaksana memungkinkan seluruh target perangkat daerah mendapatkan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Koordinasi dengan perangkat daerah berjalan baik dan pendampingan penegakan integritas telah dilakukan melalui monitoring pelaporan LHKAN dan pembangunan Zona Integritas.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sebagian pelaksanaan pengawasan internal mengalami penyesuaian jadwal karena adanya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan belum dapat dimulai atau diselesaikan sesuai jadwal awal.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga pelaksanaannya di Triwulan II dapat berjalan lancar sampai dengan Triwulan III

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sebagian besar laporan pengawasan sudah dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan sebagian lainnya tidak membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada hambatan yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai dengan targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan belum selesai sampai Triwulan III karena proses penyusunan PPBR masih berlangsung.

Pendampingan dan Asistensi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pencapaian target.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Memprioritaskan penyelesaian penugasan yang masih tersisa, mengoptimalkan pembagian jadwal tim dan melakukan monitoring penyelesaian LHP sampai akhir tahun.

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melakukan penjadwalan ulang melalui rapat RO, menetapkan prioritas penyelesaian pengawasan desa yang tertunda, mengoptimalkan sumber daya tim pemeriksa serta melakukan monitoring progres penyelesaian setiap bulan sampai akhir tahun.

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti kesepakatan sesuai rencana dan mempertahankan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pada Triwulan IV dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, kapasitas tim serta hasil evaluasi pada rapat RO bulanan yangtelah disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru termasuk penghapusan reviu renja yang akan berdampak dalam pengurangan target di Bidang AAP (PPUPD).

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

Mempercepat penyelesaian proses penyusunan PPBR dan rekomendasi kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan pada Triwulan IV.

Pendampingan dan Asistensi

Menyelesaikan aktivitas pendampingan/asistensi yang masih tersisa pada Triwulan IV dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Mempertahankan cakupan pendampingan dan meningkatkan kualitas asistensi berdasarkan kebutuhan perangkat daerah.

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pendampingan dan meningkatkan kualitas rekomendasi perbaikan reformasi birokrasi.

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Mempertahankan cakupan pendampingan dan meningkatkan monitoring atas tindak lanjut hasil pendampingan penegakan integritas.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Plt. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan

DEWI ATTUTIANINGRUM, S.Sos., M.M.
197402061999032008

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	70.41	81.87	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	33.551.920	26.018.130	77.55
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	77	77	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	15.746.920	10.635.000	67.54

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	85	80	94.12	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	15.383.130	86.40

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tindak lanjut didukung oleh mekanisme monitoring yang dilakukan secara berkala. Setiap triwulan dilaksanakan rapat monitoring persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, sehingga perkembangan penyelesaian rekomendasi dapat diketahui, permasalahan dapat diidentifikasi dan objek pengawasan yang belum menyelesaikan rekomendasi dapat diberikan perhatian lebih lanjut. Selain itu, pengelolaan tindak lanjut juga didukung oleh pemantauan melalui mekanisme administrasi tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Capaian tindak lanjut masih belum memenuhi target karena penyelesaian sebagian rekomendasi sangat bergantung pada tindak lanjut dari perangkat daerah/objek pengawasan. Beberapa rekomendasi membutuhkan proses penyelesaian lebih lanjut, terutama rekomendasi yang berkaitan dengan administrasi, keuangan maupun penyelesaian kewajiban tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi adanya penugasan mandatori yang harus dilaksanakan di luar rencana awal.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu harus menyesuaikan dengan penugasan mandatori dan kebutuhan pengawasan yang muncul selama tahun berjalan, sehingga sebagian rencana kegiatan belum dapat dimulai sesuai jadwal awal.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan perangkat daerah/objek pengawasan yang masih memiliki rekomendasi belum selesai, melakukan pemetaan rekomendasi berdasarkan tingkat penyelesaian dan permasalahannya, serta memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang berpotensi menghambat pencapaian target tindak lanjut. Monitoring akan dilanjutkan melalui rapat triwulanan dan pemantauan secara berkala sampai akhir tahun.
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SRIYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	77	77	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	15.746.920	10.635.000	67.54

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	300.000	24.00
			1.2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	Reviu Laporan Kinerja	600.000	450.000	75.00
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	3	100.00	Pengawasan Desa	13.395.920	9.735.000	72.67
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	7	7	100.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400.000	150.000	37.50
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	85	80	94.12	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	15.383.130	86.40

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2.1	Teriaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	17	16	94.12	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.805.000	15.383.130	86.40

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pengawasan berpedoman pada PKPT dan dikendalikan melalui rapat RO bulanan yang membahas penugasan yang telah selesai serta rencana penugasan bulan berikutnya.

Reviu Laporan Kinerja

Kegiatan evaluasi AKIP pada seluruh perangkat daerah telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai jadwal dengan dukungan tim evaluator.

Pengawasan Desa

Kegiatan pengawasan desa telah masuk dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaannya tetap dipantau melalui rapat RO bulanan.

Kerjasama Pengawasan Internal

Komitmen semua tim dalam penandatanganan oleh Inspektur Pembantu dalam kerjasama pengawasan internal untuk pelaksanaan reviu antar tim sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tersedianya data rekomendasi hasil pemeriksaan serta adanya mekanisme monitoring secara berkala. Rapat monitoring tindak lanjut setiap triwulan menjadi sarana untuk mengevaluasi perkembangan penyelesaian rekomendasi.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan penugasan didukung PKPT, penjadwalan melalui RO bulanan dan monitoring progres pelaksanaan kegiatan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagian penugasan belum dapat diselesaikan sampai Triwulan III karena penyesuaian jadwal dengan penugasan lainnya.

Reviu Laporan Kinerja

Tidak terdapat hambatan signifikan dalam pencapaian target dan telah terselesaikan pelaksanaannya 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga penandatanganan kerjasama pengawasan internal antar tim dapat terlaksana

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sebagian rekomendasi belum dapat diselesaikan oleh objek pengawasan sampai dengan Triwulan III sehingga dokumen hasil monitoring belum seluruhnya mencapai target tahunan.
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu **Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu harus menyesuaikan dengan penugasan mandatori dan kebutuhan pengawasan yang muncul selama tahun berjalan, sehingga sebagian rencana kegiatan belum dapat dimulai sesuai jadwal awal.**
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu **Terdapat penyesuaian jadwal akibat penugasan mandatori lainnya dan kebutuhan pengawasan yang harus diprioritaskan, sehingga sebagian target belum dapat direalisasikan sampai September.**

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Memprioritaskan penyelesaian penugasan yang masih tersisa, mengoptimalkan pembagian jadwal tim dan melakukan monitoring penyelesaian LHP sampai akhir tahun.

Reviu Laporan Kinerja

Mempertahankan capaian serta meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi hasil evaluasi AKIP.

Pengawasan Desa

Melakukan penjadwalan ulang melalui rapat RO, menetapkan prioritas penyelesaian pengawasan desa yang tertunda, mengoptimalkan sumber daya tim pemeriksa serta melakukan monitoring progres penyelesaian setiap bulan sampai akhir tahun.

Kerjasama Pengawasan Internal

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Meningkatkan koordinasi dan pemantauan terhadap objek yang memiliki rekomendasi belum selesai, menyusun daftar prioritas rekomendasi yang harus segera diselesaikan dan melakukan evaluasi progres pada monitoring triwulan berikutnya.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pada Triwulan IV dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, kapasitas tim serta hasil evaluasi pada rapat RO bulanan.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SRIYONO, S.Sos, M.M
197103271991011002

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M.
Jabatan Pelapor : Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	44.26	51.47	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	32.712.832	4.846.000	14.81

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	1.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	88	93	105.68	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.201.920	3.110.000	19,20
			1.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	85	71	83.53	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	1.736.000	10.51

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tindak lanjut didukung oleh mekanisme monitoring yang dilakukan secara berkala. Setiap triwulan dilaksanakan rapat monitoring persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, sehingga perkembangan penyelesaian rekomendasi dapat diketahui, permasalahan dapat diidentifikasi dan objek pengawasan yang belum menyelesaikan rekomendasi dapat diberikan perhatian lebih lanjut. Selain itu, pengelolaan tindak lanjut juga didukung oleh pemantauan melalui mekanisme administrasi tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Capaian tindak lanjut masih belum memenuhi target karena penyelesaian sebagian rekomendasi sangat bergantung pada tindak lanjut dari perangkat daerah/objek pengawasan. Beberapa rekomendasi membutuhkan proses penyelesaian lebih lanjut, terutama rekomendasi yang berkaitan dengan administrasi, keuangan maupun penyelesaian kewajiban tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi adanya penugasan mandatori yang harus dilaksanakan di luar rencana awal.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai melebihi targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu harus menyesuaikan dengan penugasan mandatori dan kebutuhan pengawasan yang muncul selama tahun berjalan, sehingga sebagian rencana kegiatan belum dapat dimulai sesuai jadwal awal.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan perangkat daerah/objek pengawasan yang masih memiliki rekomendasi belum selesai, melakukan pemetaan rekomendasi berdasarkan tingkat penyelesaian dan permasalahannya, serta memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang berpotensi menghambat pencapaian target tindak lanjut. Monitoring akan dilanjutkan melalui rapat triwulanan dan pemantauan secara berkala sampai akhir tahun.

Penyelenggarsan Pengawasaan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

SRIYONO, S.Sos, M.M.
197103271991011002

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : SRIYONO, S.Sos, M.M.
Jabatan Pelapor : Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	88	93	105.68	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	16.201.920	3.110.000	19.20
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.250.000	1.050.000	84.00

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	9	9	100.00	Reviu Laporan Kinerja	500.000	310.000	62.00
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	3	100.00	Pengawasan Desa	13.950.920	1.750.000	12.54
			1.4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	9	10	111.11	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	400.000	0	0

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	85	71	83.53	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	1.736.000	10.51
			2.1	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	10	83.33	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16.510.912	1.736.000	10.51

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Kegiatan pengawasan desa telah masuk dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaannya tetap dipantau melalui rapat RO bulanan.

Kerjasama Pengawasan Internal

Koordinasi internal dan komitmen antar pihak mendukung terbentuknya kesepakatan pelaksanaan reviu telaah intern.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tersedianya data rekomendasi hasil pemeriksaan serta adanya mekanisme monitoring secara berkala. Rapat monitoring tindak lanjut setiap triwulan menjadi sarana untuk mengevaluasi perkembangan penyelesaian rekomendasi.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan penugasan didukung PKPT, penjadwalan melalui RO bulanan dan monitoring progres pelaksanaan kegiatan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai melebihi targetnya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dapat berjalan dengan lancar

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada hambatan yang siginifikan karena penundaan di triwulan sebelumnya telah dapat terlaksana di Triwulan III seuai targetnya.

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Sebagian besar monitoring tindak lanjut yang dilaksanakan dapat diselesaikan oleh objek pengawasan sampai dengan Triwulan III sehingga dokumen hasil monitoring hampir seluruhnya mencapai target tahunan.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu harus menyesuaikan dengan penugasan mandatori dan kebutuhan pengawasan yang muncul selama tahun berjalan, sehingga sebagian rencana kegiatan belum dapat dimulai sesuai jadwal awal.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Terdapat penyesuaian jadwal akibat penugasan mandatori lainnya dan kebutuhan pengawasan yang harus diprioritaskan, sehingga sebagian target belum dapat direalisasikan sampai September.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Reviu Laporan Kinerja

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan III dan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Pengawasan Desa

Melakukan penjadwalan ulang melalui rapat RO, menetapkan prioritas penyelesaian pengawasan desa yang tertunda, mengoptimalkan sumber daya tim pemeriksa serta melakukan monitoring progres penyelesaian setiap bulan sampai akhir tahun.

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti kesepakatan sesuai rencana dan mempertahankan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Meningkatkan koordinasi dan pemantauan terhadap objek yang memiliki rekomendasi belum selesai, menyusun daftar prioritas rekomendasi yang harus segera diselesaikan dan melakukan evaluasi progres pada monitoring triwulan berikutnya.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pada Triwulan IV dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, kapasitas tim serta hasil evaluasi pada rapat RO bulanan.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Plt. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

SRIYONO, S.Sos, M.M.
197103271991011002

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	%	86	70.37	81.83	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	70.051.780	25.965.500	37,07

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	58	66	113.79	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	26.046.780	6.400.000	24.57
			2.2	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	88	88	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	19.565.500	44.46

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	%	100	100	100.00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	45.059.488	13.317.961	44,46
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.000.170	0	0
			2.2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	60	60	100.00	Pendampingan dan Asistensi	44.059.318	13.317.961	30,23

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			2.1	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.000.170	0	0
			2.2	Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	60	60	100.00	Pendampingan dan Asistensi	44.059.318	13.317.961	30.23

B. FAKTOR PENDUKUNG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Pelaksanaan tindak lanjut didukung oleh mekanisme monitoring yang dilakukan secara berkala. Setiap triwulan dilaksanakan rapat monitoring persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, sehingga perkembangan penyelesaian rekomendasi dapat diketahui, permasalahan dapat diidentifikasi dan objek pengawasan yang belum menyelesaikan rekomendasi dapat diberikan perhatian lebih lanjut. Selain itu, pengelolaan tindak lanjut juga didukung oleh pemantauan melalui mekanisme administrasi tindak lanjut.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Komitmen perangkat daerah dalam mengikuti pendampingan dan asistensi, dukungan tim Inspektorat serta koordinasi yang berjalan baik menjadi faktor utama tercapainya target. Pelaksanaan pendampingan juga dipantau melalui mekanisme monitoring kegiatan secara berkala.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pendampingan dan asistensi telah dilaksanakan secara intensif kepada perangkat daerah. Koordinasi antara tim Inspektorat dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan agenda reformasi birokrasi, pengendalian intern, integritas dan kebutuhan pengawasan lainnya.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026

Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pendampingan dan asistensi telah dilaksanakan secara intensif kepada perangkat daerah. Koordinasi antara tim Inspektorat dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan agenda reformasi birokrasi, pengendalian intern, integritas dan kebutuhan pengawasan lainnya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Capaian tindak lanjut masih belum memenuhi target karena penyelesaian sebagian rekomendasi sangat bergantung pada tindak lanjut dari perangkat daerah/objek pengawasan. Beberapa rekomendasi membutuhkan proses penyelesaian lebih lanjut, terutama rekomendasi yang berkaitan dengan administrasi, keuangan maupun penyelesaian kewajiban tertentu. Di sisi lain, pelaksanaan pengawasan juga menghadapi adanya penugasan mandatori yang harus dilaksanakan di luar rencana awal.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Tidak terdapat hambatan signifikan terhadap pencapaian indikator program.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai melebihi targetnya

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Pendampingan dan Asistensi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Pendampingan dan Asistensi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Meningkatkan intensitas monitoring dan koordinasi dengan perangkat daerah/objek pengawasan yang masih memiliki rekomendasi belum selesai, melakukan pemetaan rekomendasi berdasarkan tingkat penyelesaian dan permasalahannya, serta memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi yang berpotensi menghambat pencapaian target tindak lanjut. Monitoring akan dilanjutkan melalui rapat triwulanan dan pemantauan secara berkala sampai akhir tahun.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Mempertahankan capaian 100% dan meningkatkan kualitas pendampingan, asistensi, verifikasi serta monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi

Menyelesaikan aktivitas pendampingan/asistensi yang masih tersisa pada Triwulan IV dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Pendampingan dan Asistensi **Menyelesaikan aktivitas pendampingan/asistensi yang masih tersisa pada Triwulan IV dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.**

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
197006201994012001

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
Jabatan Pelapor : Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, S.E
Jabatan Pimpinan Pelapor : Inspektur

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	1	Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pengawasan internal yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	58	66	113.79	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	26.046.780	6.400.000	24,57
			1.1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	100.00	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	509.830	500.000	98.07
			1.2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	1	1	100.00	Reviu Laporan Kinerja	100.000	0	0
			1.3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	3	3	100.00	Pengawasan Desa	9.065.950	5.900.000	65.08

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			1.4	Teriaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	1	100.00	Kerjasama Pengawasan Internal	101.000	0	0
			1.5	Teriaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	2	3	150.00	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16.270.000	0	0
			2	Teriaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dimulai dibandingkan rencana kerja tahunan	%	88	88	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	19.565.500	44.46
			2.1	Teriaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	15	15	100.00	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	44.005.000	19.565.500	44.46

No	Sasaran Program Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
3	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas	3	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Dokumen	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.000.170	0	0.00
			3.1	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	0	0	0.00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.170	0	0
			4	Teriaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dimulai dibandingkan rencana pengawasan tahunan	%	60	60	100.00	Pendampingan dan Asistensi	44.059.318	13.317.961	30.23
			4.1	Teriaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	3	3	100.00	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	44.059.318	13.317.961	30.23

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Pelaksanaan pengawasan internal didukung oleh PKPT sebagai dasar perencanaan dan pengendalian penugasan. Selain itu, setiap bulan dilaksanakan rapat RO (Rencana Operasional) untuk mengevaluasi aktivitas pengawasan yang telah diselesaikan pada periode sebelumnya dan menyusun rencana aktivitas pengawasan bulan berikutnya dengan tetap mempertimbangkan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPT. Mekanisme tersebut menjadi instrumen pengendalian agar pelaksanaan penugasan tetap terarah.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya yaitu penyelesaian evaluasi AKIP 100% di bulan Juni 2026 (Triwulan II Tahun 2026)

Pengawasan Desa

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Kerjasama Pengawasan Internal

Koordinasi internal dan komitmen antar pihak mendukung terbentuknya kesepakatan pelaksanaan reviu telaah intern.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut.

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu telah direncanakan dan dikendalikan melalui PKPT serta rapat RO bulanan. Rapat tersebut digunakan untuk mengevaluasi penugasan yang telah selesai dan mengatur penugasan bulan berikutnya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan penugasan didukung PKPT, penjadwalan melalui RO bulanan dan monitoring progres pelaksanaan kegiatan.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Kebutuhan penyusunan PKPT dan tersedianya data perencanaan pengawasan mendukung tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis bidang pengawasan.

Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pendampingan dan asistensi telah dilaksanakan secara intensif kepada perangkat daerah. Koordinasi antara tim Inspektorat dengan perangkat daerah berjalan baik dan kebutuhan pendampingan dapat diidentifikasi berdasarkan agenda reformasi birokrasi, pengendalian intern, integritas dan kebutuhan pengawasan lainnya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1. **Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penanganan Pengaduan sebagai salah satu kegiatan dalam Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan I yang pelaksanaannya maju dari rencananya di Triwulan II**
2. **Terlaksananya penyusunan renaksi TL SPI dan monitoringnya**
3. **Terlaksananya monitoring MCSP RB KPK yang terbit pedomannya di bulan Agustus 2026**

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai melebihi targetnya

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat yang krusial di Triwulan III karena pelaksanaan atas target tahunannya telah terselesaikan dengan lancar di Triwulan I

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Desa Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

Kerjasama Pengawasan Internal

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga target dapat tercapai

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Tidak ada faktor penghambat karena belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tidak terdapat hambatan signifikan.

Pendampingan dan Asistensi

Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Terdapat tantangan dalam pelaksanaan monitoring MCSP RB KPK yang baru terbit pedoman pelaksanaannya di bulan Agustus 2026 sementara deadline pengumpulan beberapa dokumen pendukung di akhir September 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Rencana tindak lanjutnya adalah Mengoptimalkan rapat RO bulanan untuk melakukan penjadwalan ulang dan penentuan prioritas penugasan, mempercepat pelaksanaan pengawasan yang masih tertunda serta menjaga kesesuaian pelaksanaan penugasan dengan PKPT.

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasinya

Reviu Laporan Kinerja

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan IV karena pelaksanaan evaluasi telah terselesaikan di Triwulan I dan monitoring tindak lanjut juga telah dilaksanakan di Triwulan II dengan status terselesaikan

Pengawasan Desa

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

Kerjasama Pengawasan Internal

Menindaklanjuti kesepakatan sesuai rencana dan mempertahankan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Rencana tindak lanjutnya adaah melakukan penajaman prioritas penugasan pada rapat RO, mengoptimalkan sumber daya pengawasan dan mempercepat pelaksanaan penugasan yang masih tersisa pada Triwulan IV.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Mengoptimalkan pelaksanaan penugasan pada Triwulan IV dengan mempertimbangkan prioritas pengawasan, kapasitas tim serta hasil evaluasi pada rapat RO bulanan.

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output atas pelaksanaan masih di Triwulan IV atas penyusunan dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR)

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Mempertahankan kualitas rekomendasi kebijakan teknis dan menggunakannya sebagai dasar penguatan perencanaan pengawasan.

Pendampingan dan Asistensi

Menyelesaikan aktivitas pendampingan/asistensi yang masih tersisa pada Triwulan IV dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pendampingan.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Persiapan pelaksanaan di Triwulan IV atas Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi seperti pelaksanaan monitoring (Pengendalian Gratifikasi, Pendampingan Desa Anti Korupsi dan FCP) serta monitoring MCSP RB KPKP Triwulan IV

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Inspektur

MARDIANTO, S.E
197101241999031002

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

ARIS DEWI ANGGRAINI, S.E, M.M
197006201994012001

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MURNI HASTUTI, S.E., M.M
Jabatan Pelapor : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : DIDIK ROFIYADI, S.STP, M.H
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase layanan administrasi BMD	1	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3	4	133.33	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	462.500	235.000	50.81
2	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	2	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	18	18	100.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.040.000	0	0
			3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	3	100.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.040.000	740.000	71.15
			4	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/tahun	40	39	97.50	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	141.000.000	100.775.936	71.47
5	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.867.200	257.000	8.96
			6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.550.060	24.098.050	44.18
			7	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.225.200	670.000	30.11

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			8	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	0.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.379.900	2.584.000	12.09
			9	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.176.000	4.940.800	80.00
			10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	100.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.033.450	9.449.000	23.60
			11	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	955.000	0	0
			12	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	0.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	846.000	111.000	13.12
13	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.000.000	76.92
			14	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.300.000	27.931.110	59.05
			15	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	126.366.338	85.687.266	67.81
16	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	16	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	2	200.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.680.360	16.329.000	78.96

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
			17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	5	125.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.180.000	50.745.545	61.75
			18	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	100.00	Pemeliharaan Mebel	990.000	714.000	72.12
			19	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	3.300.000	44.00
			20	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.032.000	3.300.600	46.94
21	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Persentase layanan penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	21	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.681.900	0	0

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Rekonsiliasi SMD dilaksanakan secara triwulanan sehingga sampai dengan Triwulan III telah tersedia 4 dokumen hasil pencatatan Tahunan Tahun 2025 dan rekonsiliasi Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I dan II Tahun 2026

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Pendataan dilakukan secara rutin setiap bulan melalui laporan mekanisme kepegawaian kepada BKPSDM dan rekap kehadiran pegawai.

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian kinerja dilaksanakan secara triwulanan dengan mekanisme yang telah ditetapkan melalui e-kinerja BKN atas penilaian kinerja SKP Triwulan IV Tahun 2025, Triwulan I dan II Tahun 2026

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tersedianya kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai dan kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai tugas dan fungsi.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan telah dilaksanakan sesuai kebutuhan operasional kantor sampai dengan Triwulan III. Pelaksanaan didukung oleh identifikasi kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta koordinasi dalam proses pengadaan.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan operasional sampai dengan Triwulan III. Pelaksanaan didukung oleh perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan anggaran sesuai peruntukannya.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga telah dilakukan sesuai kebutuhan operasional dan kondisi barang yang diperlukan sampai dengan Triwulan III.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan telah dipenuhi sesuai kebutuhan pelaksanaan administrasi dan kegiatan kantor sampai dengan Triwulan III. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual sehingga pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan selama tahun berjalan.

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Fasilitasi kunjungan tamu dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dan didukung koordinasi internal dengan pelaporannya per semester dan realisasi s.d Triwulan III adalah 1 laporan atas Semester I Tahun 2026.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Koordinasi dan konsultasi telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan didukung agenda kerja masing-masing unit.

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Penatausahaan arsip dilakukan secara berkala dan didukung dokumentasi kegiatan administrasi.

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pemanfaatan sistem elektronik dalam mendukung administrasi dan pelaksanaan tugas perangkat daerah telah berjalan.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

pelayanan jasa berlangsung rutin untuk mendukung operasional kantor.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

pelayanan jasa berlangsung rutin untuk mendukung operasional kantor.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

pelayanan jasa berlangsung rutin untuk mendukung operasional kantor.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kebutuhan pemeliharaan dan pembayaran pajak/perizinan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan kendaraan operasional/lapangan.

Pemeliharaan Mebel

Kebutuhan pemeliharaan telah teridentifikasi dan dapat dilaksanakan.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan dilakukan terhadap peralatan yang membutuhkan penanganan.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kebutuhan pemeliharaan gedung dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan baru muncul di Triwulan III dalam perubahan APBD Tahun 2026 yang ditetapkan 23 September 2026 sehingga realisasinya masih di Triwulan IV

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Satu dokumen yang belum terealisasi merupakan dokumen pencatatan BMD Triwulan III Tahun 2026 yang pelaksanaannya di Triwulan IV Tahun 2026.
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Realisasi mengikuti periode bulanan sehingga sampai September baru terealisasi 18 dokumen dari target 24 dokumen tahunan.
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelaksanaan diklat sangat bergantung pada jadwal penyelenggara, ketersediaan peserta, kesesuaian materi dengan kebutuhan serta dukungan anggaran, sehingga belum seluruh target peserta dapat mengikuti diklat sampai Triwulan III.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Secara administratif capaian indikator masih tercatat 0 dari target 1 paket, karena realisasi baru dapat dicatat setelah seluruh komponen dalam paket pengadaan terselesaikan. Dengan demikian, angka capaian belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan pengadaan yang telah berjalan.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Capaian indikator masih tercatat 0 dari target 1 paket karena indikator menggunakan pendekatan paket secara keseluruhan. Pengadaan yang telah dilaksanakan sebagian belum dapat dikonversikan menjadi capaian sampai seluruh kebutuhan dalam paket terselesaikan.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Realisasi indikator masih tercatat 0 dari target 1 paket, bukan karena kegiatan tidak dilaksanakan, melainkan karena mekanisme pengukuran mengharuskan seluruh pengadaan dalam satu paket selesai terlebih dahulu untuk dapat diakui sebagai realisasi.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Realisasi indikator belum tercatat meskipun pengadaan telah berjalan, karena target ditetapkan dalam bentuk 1 paket dan pengakuan realisasi dilakukan setelah seluruh pengadaan dalam paket tersebut terselesaikan.
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Pelaksanaan bersifat situasional sehingga jumlah kunjungan bergantung pada agenda/kebutuhan kedinasan.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output berupa laporan disusun secara semesteran sehingga sampai September baru satu laporan yang terealisasi.
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Output disusun secara semesteran sehingga satu dokumen berikutnya baru dapat direalisasikan pada akhir tahun.
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
output laporan bersifat semesteran sehingga sampai September baru satu dari dua laporan yang terealisasi.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
output laporan bersifat semesteran sehingga sampai September baru satu dari dua laporan yang terealisasi.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
output laporan bersifat semesteran sehingga sampai September baru satu dari dua laporan yang terealisasi.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tidak seluruh kendaraan memerlukan pemeliharaan pada periode yang sama sehingga pelaksanaan dilakukan secara bertahap.
Pemeliharaan Mebel
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan peralatan bergantung pada kondisi masing-masing peralatan sehingga tidak seluruh unit memerlukan penanganan pada periode yang sama.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pelaksanaan dengan waktu yang terbatas sehingga diperlukan perencanaan segera agar dapat terlaksana sesuai targetnya di Triwulan IV

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Menyelesaikan dokumen pencatatan BMD untuk rekonsiliasi BMD atas Triwulan III Tahun 2026 di Triwulan IV Tahun 2026.

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Menyelesaikan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian untuk periode Oktober sampai Desember sehingga target tahunan terpenuhi.

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Mempertahankan pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala dan memastikan hasil penilaian terdokumentasi dengan baik untuk pelaksanaan penilaian kinerja SKP Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2026.

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Mengoptimalkan keikutsertaan pegawai pada pendidikan dan pelatihan yang tersedia pada Triwulan IV dengan memprioritaskan kebutuhan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan fungsi Inspektorat.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Menyelesaikan komponen pengadaan yang masih tersisa sesuai kebutuhan dan ketentuan, serta melakukan pemutakhiran pencatatan realisasi setelah seluruh komponen dalam paket selesai sehingga capaian indikator dapat direalisasikan sesuai target.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Melanjutkan pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang masih tersisa, melakukan penyelesaian administrasi pengadaan, dan memperbarui realisasi indikator setelah paket pengadaan selesai seluruhnya.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Menyelesaikan pemenuhan kebutuhan yang masih tersisa sesuai rencana dan kebutuhan riil, kemudian melakukan pencatatan realisasi setelah keseluruhan paket pengadaan selesai.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Melanjutkan pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sampai akhir tahun sesuai kebutuhan, menyelesaikan seluruh komponen dalam paket, serta melakukan pemutakhiran capaian setelah paket dinyatakan selesai.

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Melanjutkan fasilitasi kunjungan tamu sesuai kebutuhan dan menyelesaikan laporan periode berikutnya sekaligus pelaporannya atas Semester II Tahun 2026.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Melaksanakan koordinasi/konsultasi sesuai kebutuhan pada Triwulan IV dan menyelesaikan laporan semester berikutnya.

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Menyelesaikan penatausahaan dan laporan arsip dinamis periode berikutnya pada Triwulan IV.

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Mempertahankan pemanfaatan SPBE dan meningkatkan kelengkapan dokumentasi dukungan SPBE.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

melanjutkan penyediaan jasa secara berkesinambungan dan menyelesaikan laporan semester berikutnya pada Triwulan IV.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

melanjutkan penyediaan jasa secara berkesinambungan dan menyelesaikan laporan semester berikutnya pada Triwulan IV.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

melanjutkan penyediaan jasa secara berkesinambungan dan menyelesaikan laporan semester berikutnya pada Triwulan IV.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Mempertahankan pemeliharaan dan memastikan kewajiban pajak/perizinan kendaraan tetap terpenuhi.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Melakukan pemeriksaan kondisi seluruh kendaraan dan menjadwalkan pemeliharaan kendaraan yang masih memerlukan penanganan pada Triwulan IV.

Pemeliharaan Mebel

Mempertahankan kondisi mebel melalui pemeliharaan sesuai kebutuhan.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melakukan pengecekan kondisi peralatan dan menyelesaikan pemeliharaan terhadap unit yang masih membutuhkan penanganan.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Mempertahankan kondisi gedung melalui pemeliharaan berkala sesuai kebutuhan.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana pelaksanaan di Triwulan IV

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Sekretaris

DIDIK ROFIYADI, S.STP, M.H
19831225200212100 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

MURNI HASTUTI, S.E., M.M
197507102009032003

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
INSPEKTORAT
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M
Jabatan Pelapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : DIDIK ROPIYADI, S.STP, M.H
Jabatan Pimpinan Pelapor : Sekretaris

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU DAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							Keuangan			
			No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	5	166.67	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	987.000	980.000	99.29
			2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	940.000	490.000	52.13
3	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	44	43	97.72	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.783.983.699	4.725.476.330	69.66
			4	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.044.000	8.662.500	71.92
			5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	10	100.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	494.000	228.000	46.15

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi penyusunan dokumen berjalan baik dan data pendukung tersedia. Dokumen Renja, KAK, RKA, PPRG dan RTP telah dapat disusun sesuai kebutuhan.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tersedianya data dan dokumen kinerja serta koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi sehingga LKjIP Tahun Anggaran 2025 dapat disusun.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi pembayaran gaji dan tunjangan didukung oleh data kepegawaian dan pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Ketersediaan data dan dokumen keuangan serta koordinasi antara pengelola keuangan mendukung penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Pelaporan keuangan dilakukan secara rutin sesuai periode dan didukung ketersediaan data keuangan. Sampai dengan Triwulan III telah terealisasi laporan bulanan dan laporan semester I sesuai periode yang telah berjalan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Realisasi sebanyak 43 orang/bulan belum mencapai target 44 orang/bulan karena adanya perubahan kondisi/jumlah pegawai yang menjadi dasar pembayaran gaji dan tunjangan selama tahun berjalan.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tidak terdapat hambatan signifikan.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tiga laporan yang belum terealisasi merupakan laporan untuk periode berikutnya yang memang baru dapat disusun setelah periode pelaporan berakhir.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Mempertahankan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen serta melakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan kebijakan atau kebutuhan organisasi.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Mempertahankan pelaksanaan evaluasi kinerja secara tepat waktu serta meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi hasil evaluasi.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala dan memastikan pembayaran gaji dan tunjangan dilaksanakan sesuai kondisi pegawai serta ketentuan yang berlaku sampai akhir tahun.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Mempertahankan kualitas koordinasi dan penatausahaan keuangan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan akhir tahun secara tepat waktu dan akuntabel.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Menyelesaikan laporan keuangan periode Oktober, November, Desember dan laporan yang menjadi bagian dari target tahunan sesuai jadwal pelaporan.

Wonogiri, 01 Oktober 2026

Sekretaris

DIDIK ROPIYADI, S.STP, M.H
198312252002121001

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M
197212271992032002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **HERY SUBYANTO, S.IP**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu LKPD yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusnnnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	5	5	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	18	18	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II
Reviu Laporan Keuangan
Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya
Kerjasama Pengawasan Internal
Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Keuangan
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar
Kerjasama Pengawasan Internal
Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Tidak ada faktor penghambat yang krusial
Penyelesaian kerugian negara/daerah
Tidak ada faktor penghambat karena pada Triwulan III ini tidak ada rencana pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait reviu laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 01 Oktober 2026 Auditor Ahli Pertama HERY SUBYANTO, S.IP 197906302006041008

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **AGUSTIN RATRIANA, SE**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Madya**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemeriatah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu LKPD yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	5	5	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	2	200.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	18	18	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan II
Reviu Laporan Keuangan
Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya
Kerjasama Pengawasan Internal
Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Keuangan
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar
Kerjasama Pengawasan Internal
Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Tidak ada faktor penghambat yang krusial
Penyelesaian kerugian negara/daerah
Tidak ada faktor penghambat karena pada Triwulan III ini tidak ada rencana pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah **Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan**
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah **Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan**
Reviu Laporan Kinerja **Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Prugtum Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan II**
Reviu Laporan Keuangan **Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait reviu laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I**
Kerjasama Pengawasan Internal **Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV**
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan**
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah **Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan**
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu **Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV**

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 01 Oktober 2026** **Auditor Ahli Madya** **AGUSTIN RATRIANA, SE** **198508222009032008**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **SUKIYATNO, S.E.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu LKPD yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	5	5	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	18	18	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Reviu Laporan Keuangan
Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya
Kerjasama Pengawasan Internal
Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Keuangan
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar
Kerjasama Pengawasan Internal
Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Tidak ada faktor penghambat yang krusial
Penyelesaian kerugian negara/daerah
Tidak ada faktor penghambat karena pada Triwulan III ini tidak ada rencana pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan III

Reviu Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait reviu laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 01 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **SUKIYATNO, S.E.** **197408112009011005**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **AJENG WULAN HAPSARI, S.Ak**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Laporan	2	2	100.00	
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu LKPD yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	5	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Telaah Intern Antar Bidang yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
6	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Monitoring Tindak Lanjut yang Disusun	Dokumen	5	5	100.00	
7	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	7	Tersusunnya Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
8	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	18	18	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Reviu Laporan Keuangan
Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya
Kerjasama Pengawasan Internal
Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 Triwulan III

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di tahun 2026 sehingga pelaksanaan evaluasi AKIP dapat berjalan lancar
Reviu Laporan Keuangan
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Reviu atas LKPD Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana di Triwulan I dengan lancar
Kerjasama Pengawasan Internal
Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Tidak ada faktor penghambat yang krusial
Penyelesaian kerugian negara/daerah
Tidak ada faktor penghambat karena pada Triwulan III ini tidak ada rencana pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Melaksanakan pengawasan kinerja pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada tindak lanjut karena target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 telah terselesaikan 100% di Triwulan III

Reviu Laporan Keuangan

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sudah tidak ada lagi rencana pelaksanaan terkait reviu laporan keuangan sehingga telah terselesaikan 100% pelaksanaannya di Triwulan I

Kerjasama Pengawasan Internal

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan IV

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Melaksanakan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah pada triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 01 Oktober 2026 Auditor Ahli Pertama AJENG WULAN HAPSARI, S.Ak 199912172022032003

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : E.EKO KRISTIYANTO,S.IP
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Madya
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	9	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	17	16	94.12	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan sebelumnya.

Pengawasan Desa
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026 serta koordinasi dengan Desa yang manjadi obyek pengawasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga tidak ada realisasi di Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Belum tersedianya dokumen dari obyek pengawasan yang dibutuhkan pada saat pengawasan, sehingga diperlukan waktu untuk mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu, sedangkan informasi pengawasan sudah disampaikan oleh APIP sebelum dimulainya pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksankan sesuai dengan PKPT Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Tidak ada faktor penghambat, sehingga target tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dipenuhi pada Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun adanya perubahan regulasi dan pedoman MCSP yang menyebabkan Reviu RKA dan Reviu HPS dihapus, sehingga perlu diganti dengan pengawasan lainnya yang akan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Kinerja, karena dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan sudah tersedia.

Reviu Laporan Kinerja
Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Bidang
Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, yaitu pada Triwulan ke IV Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Target dapat selesai 100% di Triwulan III Tahun 2026, serta tetap melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Madya** **E.EKO KRISTIYANTO,S.IP** **196707211990031005**

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja	: JAROD MALADI GUNAWAN, A.Md
Jabatan Pelapor	: Auditor Penyelia
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev	: MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor	: INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	9	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	17	16	94.12	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan sebelumnya.

Pengawasan Desa
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026 serta koordinasi dengan Desa yang manjadi obyek pengawasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga tidak ada realisasi di Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Belum tersedianya dokumen dari obyek pengawasan yang dibutuhkan pada saat pengawasan, sehingga diperlukan waktu untuk mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu, sedangkan informasi pengawasan sudah disampaikan oleh APIP sebelum dimulainya pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksankan sesuai dengan PKPT Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Tidak ada faktor penghambat, sehingga target tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dipenuhi pada Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun adanya perubahan regulasi dan pedoman MCSP yang menyebabkan Reviu RKA dan Reviu HPS dihapus, sehingga perlu diganti dengan pengawasan lainnya yang akan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Kinerja, karena dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan sudah tersedia.

Reviu Laporan Kinerja
Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Bidang
Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, yaitu pada Triwulan ke IV Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Target dapat selesai 100% di Triwulan III Tahun 2026, serta tetap melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Penyelia** **JAROD MALADI GUNAWAN, A.Md** **197605042011011003**

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : PAMELA DEVI CAHYARINI, S.Ak.
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	9	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	17	16	94.12	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan sebelumnya.

Pengawasan Desa
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026 serta koordinasi dengan Desa yang manjadi obyek pengawasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga tidak ada realisasi di Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Belum tersedianya dokumen dari obyek pengawasan yang dibutuhkan pada saat pengawasan, sehingga diperlukan waktu untuk mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu, sedangkan informasi pengawasan sudah disampaikan oleh APIP sebelum dimulainya pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksankan sesuai dengan PKPT Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Tidak ada faktor penghambat, sehingga target tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dipenuhi pada Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun adanya perubahan regulasi dan pedoman MCSP yang menyebabkan Reviu RKA dan Reviu HPS dihapus, sehingga perlu diganti dengan pengawasan lainnya yang akan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Kinerja, karena dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan sudah tersedia.

Reviu Laporan Kinerja
Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Bidang
Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, yaitu pada Triwulan ke IV Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Target dapat selesai 100% di Triwulan III Tahun 2026, serta tetap melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **PAMELA DEVI CAHYARINI, S.Ak.** **199703122020122007**

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : FARIDA ISMI TRI HAPSARI, S.H.
Jabatan Pelapor : PPUPD Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	9	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	17	16	94.12	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan sebelumnya.

Pengawasan Desa
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026 serta koordinasi dengan Desa yang manjadi obyek pengawasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga tidak ada realisasi di Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Belum tersedianya dokumen dari obyek pengawasan yang dibutuhkan pada saat pengawasan, sehingga diperlukan waktu untuk mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu, sedangkan informasi pengawasan sudah disampaikan oleh APIP sebelum dimulainya pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksankan sesuai dengan PKPT Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Tidak ada faktor penghambat, sehingga target tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dipenuhi pada Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun adanya perubahan regulasi dan pedoman MCSP yang menyebabkan Reviu RKA dan Reviu HPS dihapus, sehingga perlu diganti dengan pengawasan lainnya yang akan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Kinerja, karena dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan sudah tersedia.

Reviu Laporan Kinerja
Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Bidang
Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, yaitu pada Triwulan ke IV Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Target dapat selesai 100% di Triwulan III Tahun 2026, serta tetap melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **PPUPD Ahli Pertama** **FARIDA ISMI TRI HAPSARI, S.H.** **199401142025062002**

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ALFI FAJRIAN MUKTI, S.H.
Jabatan Pelapor : Auditor Ahli Pertama
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	9	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	17	16	94.12	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan II Tahun 2026, sehingga target sudah terpenuhi pada Triwulan sebelumnya.

Pengawasan Desa
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan desa sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026 serta koordinasi dengan Desa yang manjadi obyek pengawasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga tidak ada realisasi di Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan monitoring Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan Pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Belum tersedianya dokumen dari obyek pengawasan yang dibutuhkan pada saat pengawasan, sehingga diperlukan waktu untuk mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu, sedangkan informasi pengawasan sudah disampaikan oleh APIP sebelum dimulainya pengawasan.

Reviu Laporan Kinerja
Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pengawasan bersifat rutin setiap tahun dan tidak ada perubahan regulasi evaluasi di Tahun 2026 sehingga evaluasi AKIP dapat dilaksankan sesuai dengan PKPT Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Pelaksanaan pengawasan desa mengalami penundaan sehingga masih terdapat sejumlah penugasan yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh banyaknya penugasan mandatori lainnya di luar perencanaan PKPT, sehingga kapasitas waktu dan sumber daya tim pengawasan harus disesuaikan dengan prioritas penugasan.

Telaah Intern Antar Bidang
Tidak ada faktor penghambat, karena tidak ada rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Tidak ada faktor penghambat, sehingga target tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan sudah bisa dipenuhi pada Triwulan III Tahun 2026.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tidak ada faktor penghambat yang krusial, namun adanya perubahan regulasi dan pedoman MCSP yang menyebabkan Reviu RKA dan Reviu HPS dihapus, sehingga perlu diganti dengan pengawasan lainnya yang akan dilaksanakan di Triwulan IV Tahun 2026.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Kinerja, karena dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan sudah tersedia.

Reviu Laporan Kinerja
Target dapat selesai 100% di Triwulan II Tahun 2026.

Pengawasan Desa
Percepatan penyelesaian laporan Pengawasan Desa dan melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya sebagaimana yang menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Telaah Intern Antar Bidang
Pelaksanaan kegiatan telaah intern antar tim sesuai jadwal kegiatan yang tercantum pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, yaitu pada Triwulan ke IV Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Target dapat selesai 100% di Triwulan III Tahun 2026, serta tetap melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **ALFI FAJRIAN MUKTI, S.H.** **199809262025062002**

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **RINI SETYA HASTUTI, A.Md**
Jabatan Pelapor : **Pranata Komputer Mahir**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Tersusunnya Laporan Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Kegiatan UPG	Laporan	2	2	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Aset	Laporan	2	2	100.00	
			3	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	100.00	
			4	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	4	100.00	
5	IKM Inspektorat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	
6	IKM Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.00	
7	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	Unit	4	5	125.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
		Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya					
8	IKM Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi
Dukungan pimpinan dan tersedianya admin UPG dalam pelaksanaan kegiatan UPG di Inspektorat, serta adanya laporan dari pegawai/ASN/pihak terkait yang menerima atau mengetahui adanya gratifikasi

Laporan Aset
Tersedianya data dan dokumen administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara lengkap dan tepat waktu dari pengurus barang

Pemeliharaan Barang Milik Daaerah SKPD
Tersedianya anggaran sehingga pemeliharaan BMD dapat dilaksanakan pada Triwulan III

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Ketersedian data dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMD Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksaanakan di Triwulan III Tahun 2026

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya anggaran dan koordinasi yang baik sehingga pemeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terealisasi Triwulan III

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Ketersediaan anggaran dan data kebutuhan atas Peralatan dan Perlengkapan Kantor di tahun 2026

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi
Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan sampai dengan Triwulan III, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target yang direncanakan dapat tercapai

Laporan Aset
Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penyusunan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD pada Triwulan III

Pemeliharaan Barang Milik Daaerah SKPD
Tidak terdapat hambatan yang signifikan sehingga kegiatan berjalan sesuai rencana

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Ketersediaan data dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMD Triwulan I Tahun 2026 yang dilaksanakan di Triwulan III Tahun 2026

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi
Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi Melanjutkan pelaksanaan kegiatan UPG di Triwulan IV

Laporan Aset
Meningkatkan koordinasi dengan pengurus barang guna mendukung penyusunan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD secara tepat waktu dan akurat pada Triwulan IV

Pemeliharaan Barang Milik Daaerah SKPD
Melanjutkan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD secara berkala di Triwulan IV

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Melanjutkan pelaksanaan rekonsiliasi atas Triwulan II di Triwulan IV

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Melanjutkan pemeliharaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor secara berkala di Triwulan IV

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Triwulan IV Tahun 2026

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 05 Oktober 2026 Pranata Komputer Mahir RINI SETYA HASTUTI, A.Md 198110262010012015

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **NINDA SARASWATI, A.Md.Kom**
Jabatan Pelapor : **Pranata Komputer Terampil**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Tersusunnya Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Tersusunnya Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	0	0	0.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Tersedianya sumber daya dan sarana pendukung untuk pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD apabila kegiatan dilaksanakan.

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tersedianya sarana, prasarana, dan sumber daya pendukung untuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Belum adanya kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Triwulan III, sehingga belum terdapat realisasi kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan, karena belum adanya realisasi sampai dengan Triwulan III disebabkan kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE belum dilaksanakan pada periode tersebut.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tidak terdapat faktor penghambat yang signifikan karena belum adanya realisasi sampai dengan Triwulan III disebabkan pelaporan kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II dan Triwulan IV sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Melakukan persiapan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Triuwlan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan.

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Melakukan persiapan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Menyiapkan laporan di Triwulan IV

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 05 Oktober 2026 Pranata Komputer Terampil NINDA SARASWATI, A.Md.Kom 199710052025062002

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **FITRI LESTARI, S.Kom**
Jabatan Pelapor : **Pranata Komputer Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Tersusunnya Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	18	18	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	Tersusunnya Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	3	3	100.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Tersuaunnya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	3	3	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Ketersediaan data dan koordinasi dengan bawahan terkait Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian atas rekap kehadiran pegawai bulanan dan laporan mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Ketersediaan data dan dokumen terkait Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai atas SKP Triwulan IV Tahun 2025 (di Triwulan I) dan SKP Triwulan I Tahun 2026 (di Triwulan II)

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Ketersediaan data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2026 sehingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sampai dengan Triwulan II dapat berjalan lancar

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pelaksanaan yang rutin sehingga belum ada faktor penghambat yang krusial yang dapat menghambat Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian selama ini

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Melanjutkan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di Triwulan IV atas kinerja pegawai Triwulan III Tahun 2026

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Penugasan mandatori di luar perencanaan sehingga terkadang mengakibatkan pegawai terkait yang telah direncanakan pelatihannya menjadi dibatalkan

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Melanjutkan pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian atas rekap kehadiran pegawai bulanan dan laporan mekanisme kepegawaian bulanan ke BKPSDM di Triwulan IV Tahun 2026

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Melanjutkan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sesuai rencana dalam data rencana pendidikan dan pelatihan di Tahun 2026 untuk Triwulan IV Tahun 2026

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 05 Oktober 2026 Pranata Komputer Ahli Pertama FITRI LESTARI, S.Kom 198307122010012031

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Muda**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	15	15	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1		0.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan II Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan III Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan III Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Muda** **YULIA INDAH CINTAMI, SE, M.Si** **198007312009032007**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **RIZA YOGA SUSANTO, S.E.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	15	15	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan II Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan III Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan III Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **RIZA YOGA SUSANTO, S.E.** **199703262020121005**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **Ir.MOH.RIFAI, M.Si.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Utama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja						
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	10	10	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	6	6	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	10	10	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	22	22	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan II Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan III Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan III Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Utama** **H.MOH.RIFAI, M.Si.** **196405081990031007**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **FARRIKA KUSFANDARU, S.T.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	1	1	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	15	15	100.00	
7	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7	Tersusunnya Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Reviu Laporan Kinerja:

Penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga sudah terealisasi di Triwulan II Tahun 2026.

Laporan Pengawasan Desa:

Pelaksanaan Pengawasan Desa yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan Pengawasan Kinerja Tahun Anggaran 2025 di Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar.

Reviu Laporan Kinerja:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana.

Laporan Pengawasan Desa:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga realisasinya dapat melebihi rencana targetnya di Triwulan III Tahun 2026.

Telaah Intern Antar Bidang:

Belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III sehingga realisasinya juga belum ada sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga dapat terealisasi dengan lancar sesuai dengan rencananya.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Triwulan III Tahun 2026 dapat berjalan lancar.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Reviu Laporan Kinerja:

Target pada tahun 2026 telah tercapai.

Laporan Pengawasan Desa:

Melanjutkan pelaksanaan Pengawasan Desa pada Pemerintah Desa lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang:

Telaah Intern Antar Bidang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu lainnya yang telah tercantum dan menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV.

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi seta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Triwulan berikutnya.

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **FARRIKA KUSFANDARU, S.T.** **199506082025062002**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **SETYAWAN ARFIANTO, S.Sos**
Jabatan Pelapor : **PPUPD Ahli Madya**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM Triwulan II dan III	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM per Urusan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Reviu Tipologi	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
					Perangkat Daerah pada BPBD					
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Evaluasi AKIP

1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai

2) Pra Evaluasi dilakukan reviu atas Dokumen LkJIP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

Reviu LPPD :

1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD

2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

Pemeriksaan Kinerja :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan.

b. Telah dilaksanakan Pengumpulan informasi awal

c. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

Pemeriksaan NSPK :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Tersedia panduan pelaksanaan pemeriksaan

d. Objek pemeriksaan sangat koorperatif

SPM Triwulanan :

a. Aplikasinya mendukung proses kerja pengawasan

b. Waktu penugasan mencukupi

c. Adanya pedoman pelaksanaan pengawasan

Manajemen ASN :

a. Panduan pelaksanaan reviu dari MCSP KPK telah tersedia

b. Ruang lingkup jelas dan sederhana

c. Dokumen reviu tersedia dan terasusun rapih

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Ruang lingkup jelas

b. Sudah ada rekomendasi dari Provinsi

Pemantauan RTP :

a. Petugas pemantauan memadai

b. Perangkat daerah paham atas kewajibannya

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Komitmen Pimpinan

2) Dukungan / komitmen dari pemilik risiko level Perangkat Daerah

3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Koordinasi secara berkala antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan RB tersedia

b. Tim sudah bekerja optimal

c. Dokumen rencana aksi telah dilegalkan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Dukungan dari Pimpinan

2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

3) Perubahan SOTK menyulitkan pengukuran capaian kinerja

Reviu LPPD :

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya terlambat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

Pemeriksaan Kinerja :

a. Pedoman pelaksana belum tersedia

b. Personil / petugas pemerika belum di diklatkan penugasan tersebut

c. Ruang lingkup berbenturan / beririsan dengan urusan pemerintah lainnya

d. Obyek pemeriksaan tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi karena alasan tertentu

Pemeriksaan NSPK :

a. Personil / petugas pemeriksa belum kompeten di bidangnya

b. Batas waktu pemeriksaan terbatas karena berbenturan waktunya dengan penugasan mandatory

SPM Triwulanan :

a. Aplikasi tidak mendukung kerja

b. Waktu yang diberikan pusat untuk APIP melakukan reviu berbarengan dengan waktu penginputan

c. Belum tersedia pedoman reviu dari pusat

Manajemen ASN :

a. Kesulitan memeriksa isi aplikasi karena akses terhadap aplikasi terbatas.

b.Dokumen yang direviu kebanyakan bersifat rahasia sehingga PD yang menangani urusan kepegawaian sedikit ragu menyerahkan ke tim pemeriksa.

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Waktu pelaksanaan pengawasan singkat

b. Belum ada pedoman pelaksanaan

Pemantauan RTP :

Petugas pemantauan jumlah / kuantitas sedikiti / belum optimal

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh MenpanRB sering mengalami *trouble*, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan evaluasi belum tersedia

b. Bukti dukung tidak tersedia

c. Pemahaman terkait pelaksanaan RB belum optimal

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Obrik telah merasa jenuh melakukan pemenuhan dokumen

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi AKIP

1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi

2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala.

Reviu LPPD :

1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri

2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun Kemendagri

3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala-kendala untuk menghasilkan solusi terbaik

Pemeriksaan Kinerja :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Melakukan entry meeting dengan obyek pemeriksaan

c. Melakukan ekspose atas temuan

Pemeriksaan NSPK :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Ruang lingkup dibuat lebih sederhan

SPM Triwulanan :

a. Intens / berkala berkoordinasi dengan Bangda

b. Bekerja sama dengan Bagian Pemerintah Setda Kab. Wonogiri

Manajemen ASN :

a. Melakukan wawancara langsung pada BKPSDM dengan menghadirkan seluruh operator

b. Membuat pakta integritas

SPM per urusan :

akan dilaksanakan di tw IV

Reviu kelembagaan BPBD :

Penugasan ini mandatory, untuk kedepannya penugasan jenis ini lebih intens dalam berkoordinasi dengan bagian organisasi Setda Kab. Wonogiri dan Setda Provinsi yang membidangi kelembagaan organisasi

Pemantauan RTP :

Buat aplikasi / *tool* yang mempermudah pelaksanaan pemantauan

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

akan dilaksanakan di TW IV

Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.

2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

Evaluasi RB perencanaan :

1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulanan :

Rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi triwulanan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

2) Bekerja sama dengan operator yang menangani pelaporan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 01 Oktober 2026 PPUPD Ahli Madya SETYAWAN ARFIANTO, S.Sos 197901152005011006

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt**
Jabatan Pelapor : **PPUPD Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersuunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM Triwulan II dan III	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM per Urusan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Reviu Tipologi	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
					Perangkat Daerah pada BPBD					
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Evaluasi AKIP

1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai

2) Pra Evaluasi dilakukan reviu atas Dokumen LkJIP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten WonogIri

3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

Reviu LPPD :

1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD

2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

Pemeriksaan Kinerja :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

Pemeriksaan NSPK :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Tersedia panduan pelaksanaan pemeriksaan

d. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

SPM Triwulanan :

a. Aplikasinya mendukung proses kerja pengawasan

b. Waktu penugasan mencukupi

c. Adanya pedoman pelaksanaan pengawasan

Manajemen ASN :

a. Panduan pelaksanaan reviu dari MCSP KPK telah tersedia

b. Ruang lingkup jelas dan sederhana

c. Dokumen reviu tersedia dan tersusun rapih

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Ruang lingkup jelas

b. Sudah ada rekomendasi dari Provinsi

Pemantauan RTP :

a. Petugas pemantauan memadai

b. Perangkat daerah paham atas kewajibannya

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Komitmen Pimpinan

2) Dukungan / komitmen dari pemilik risiko level Perangkat Daerah

3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Koordinasi secara berkala antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

Evaluasi Internal RB Tahap pelaksanaan triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan RB tersedia

b. Tim sudah bekerja optimal

c. Dokumen rencana aksi telah dilegalkan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Dukungan dari Pimpinan

2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

3) Perubahan SOTK menyulitkan pengukuran capaian kinerja

Reviu LPPD :

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya terlambat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

Pemeriksaan Kinerja :

a. Pedoman pelaksana belum tersedia

b. Personil / petugas pemeriksa belum di diklatkan penugasan tersebut

c. Ruang lingkup berbenturan / beririsan dengan urusan pemerintahan lainnya

d. Obyek pemeriksaan tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi karena alasan tertentu

Pemeriksaan NSPK :

a. Pedoman pelaksana belum tersedia

b. Personil / petugas pemeriksa belum di diklatkan penugasan tersebut

c. Ruang lingkup berbenturan / beririsan dengan urusan pemerintah lainnya

d. Obyek pemeriksaan tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi karena alasan

SPM Triwulanan :

a. Aplikasi tidak mendukung kerja

b. Waktu yang diberikan pusat untuk APIP melakukan reviu berbarengan dengan waktu penginputan

c. Belum tersedia pedoman reviu dari pusat

Manajemen ASN :

a. Kesulitan memeriksa isi aplikasi karena akses terhadap aplikasi terbatas.

b. Dokumen yang direviu kebanyakan bersifat rahasia sehingga PD yang menangani urusan kepegawaian sedikit ragu menyerahkan ke tim pemeriksa

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Waktu pelaksanaan pengawasan singkat

b. Belum ada pedoman pelaksanaan

Pemantauan RTP :

Petugas pemantauan jumlah / kuantitas sedikiti / belum optimal

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh MenpanRB sering mengalami *trouble*, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

Evaluasi Internal RB Tahap pelaksanaan triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan evaluasi belum tersedia

b. Bukti dukung tidak tersedia

c. Pemahaman terkait pelaksanaan RB belum optimal

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Obrik telah merasa jenuh melakukan pemenuhan dokumen

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi AKIP

1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi

2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala

Reviu LPPD :

1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri

2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun Kemendagri

3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala-kendala untuk menghasilkan solusi terbaik

Pemeriksaan Kinerja :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Melakukan entry meeting dengan obyek pemeriksaan

c. Melakukan ekspose atas temuan

Pemeriksaan NSPK :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Ruang lingkup dibuat lebih sederhana

SPM Triwulanan :

a. Intens / berkala berkoordinasi dengan Bangda

b. Bekerja sama dengan bagian Pemerintah Setda Kab. Wonogiri

Manajemen ASN :

a. Melakukan wawancara langsung pada BKPSDM dengan menghadirkan seluruh operator

b. Membuat pakta integritas

SPM per urusan :

akan dilaksanakan di TW IV

Reviu kelembagaan BPBD :

Penugasan ini meandatory, untuk kedepannya penugasan jenis ini lebih intens dalam berkoordinasi dengan bagian organisasi Setda Kab. Wonogiri dan Setda Provinsi yang membidangi kelembagaan organisasi

Pemantauan RTP :

Buat aplikasi / *tool* yang mempermudah pelaksanaan pemantauan

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

akan dilaksanakan di TW IV

Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.

2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

Evaluasi RB perencanaan :

1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

Evaluasi Internal RB Tahap pelaksanaan triwulanan :

Rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi triwulanan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

2) Bekerja sama dengan operator yang menangani pelaporan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 01 Oktober 2026 PPUPD Ahli Pertama ANDRIYANTO TULUS WIJAYA, S.Pt 198101262010041001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **FARHAN ADNAN IHFANDI, S.Tr.I.P**
Jabatan Pelapor : **PPUPD Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM Triwulan II dan III	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM per Urusan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Reviu Tipologi	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
					Perangkat Daerah pada BPBD					
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Evaluasi AKIP

1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai

2) Pra Evaluasi dilakukan reviu atas Dokumen LkJIP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

Reviu LPPD :

1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD

2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

Pemeriksaan Kinerja :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

Pemeriksaan NSPK :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Tersedia panduan pelaksanaan pemeriksaan

d. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

SPM Triwulanan :

a. Aplikasinya mendukung proses kerja pengawasan

b. Waktu penugasan mencukupi

c. Adanya pedoman pelaksanaan pengawasan

Manajemen ASN :

a. Panduan pelaksanaan reviu dari MCSP KPK telah tersedia

b. Ruang lingkup jelas dan sederhana

c. Dokumen reviu tersedia dan terasuun rapih

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Ruang lingkup jelas

b. Sudah ada rekomendasi dari Provinsi

Pemantauan RTP :

a. Petugas pemantauan memadai

b. Perangkat daerah paham atas kewajibannya

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Komitmen Pimpinan

2) Dukungan / komitmen dari pemilik risiko level Perangkat Daerah

3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Koordinasi secara berkala antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan RB tersedia

b. Tim sudah bekerja optimal

c. Dokumen rencana aksi telah dilegalkan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Dukungan dari Pimpinan

2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

3) Perubahan SOTK menyulitkan pengukuran capaian kinerja

Reviu LPPD :

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya terlambat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

Pemeriksaan Kinerja :

a. Pedoman pelaksana belum tersedia

b. Personil / petugas pemeriksa belum di diklatkan penugasan tersebut

c. Ruang lingkup berbenturan / beririsan dengan urusan pemerintah lainnya

d. Obyek pemeriksaan tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi karena alasan tertentu

Pemeriksaan NSPK :

a. Personil / petugas pemeriksa belum kompeten di bidangnya

b. Batas waktu pemeriksaan terbatas karena berbenturan waktunya dengan penugasan mandatory

SPM Triwulanan :

a. Aplikasi tidak mendukung kerja

b. Waktu yang diberikan pusat untuk APIP melakukan reviu berbarengan dengan waktu penginputan

c. Belum tersedia pedoman reviu dari pusat

Manajemen ASN :

a. Kesulitan memeriksa isi aplikasi karena akses terhadap aplikasi terbatas

b. Dokumen yang direviu kebanyakan bersifat rahasia sehingga PD yang menangani urusan kepegawaian sedikit ragu menyerahkan ke tim pemeriksa.

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Waktu pelaksanaan pengawasan singkat

b. Belum ada pedoman pelaksanaan

Pemantauan RTP :

Petugas pemantauan jumlah / kuantitas sedikiti / belum optimal

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh MenpanRB sering mengalami *trouble*, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan evaluasi belum tersedia

b. Bukti dukung tidak tersedia

c. Pemahaman terkait pelaksanaan RB belum optimal

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Obrik telah merasa jenuh melakukan pemenuhan dokumen

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi AKIP

1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi

2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala

Reviu LPPD :

1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri

2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun Kemendagri

3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala-kendala untuk menghasilkan solusi terbaik

Pemeriksaan Kinerja :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Melakukan entry meeting dengan obyek pemeriksaan

c. Melakukan ekspose atas temuan

Pemeriksaan NSPK :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Ruang lingkup dibuat lebih sederhana

SPM Triwulanan :

a. Intens / berkala berkoordinasi dengan Bangda

b. Bekerja sama dengan bagian Pemerintah Setda Kab. Wonogiri

Manajemen ASN :

a. Melakukan wawancara langsung pada BKPSDM dengan menghadirkan seluruh operator

b. Membuat pakta integritas

SPM per urusan :

akan dilaksanakan di TW IV

Reviu kelembagaan BPBD :

Penugasan ini mandatory, untuk kedepannya penugasan jenis ini lebih intens dalam berkoordinasi dengan bagian organisasi Setda Kab. Wonogiri dan Setda Provinsi yang membidangi kelembagaan organisasi

Pemantauan RTP :

Buat aplikasi / *tool* yang mempermudah pelaksanaan pemantauan

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

akan dilaksanakan di TW IV

Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.

2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

Evaluasi RB perencanaan :

1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan triwulanan :

Rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi triwulanan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

2) Bekerja sama dengan operator yang menangani pelaporan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 01 Oktober 2026 PPUPD Ahli Pertama Al FARHAN ADNAN IHFANDI, S.Tr.I.P 200105012025101001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **ARIEF WULANDARI, S.P, M.P**
Jabatan Pelapor : **PPUPD Ahli Muda**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM Triwulan II dan III	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM per Urusan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Reviu Tipologi	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
					Perangkat Daerah pada BPBD					
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Evaluasi AKIP

1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai

2) Pra Evaluasi dilakukan reviu atas Dokumen LkJIP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

Reviu LPPD :

1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD

2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

Pemeriksaan Kinerja :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

Pemeriksaan NSPK :

a. SDM yang kompeten

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Tersedia panduan pelaksanaan pemeriksaan

d. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

SPM Triwulanan :

a. Aplikasinya mendukung proses kerja pengawasan

b. Waktu penugasan mencukupi

c. Adanya pedoman pelaksanaan pengawasan

Manajemen ASN :

a. Panduan pelaksanaan reviu dari MCSP KPK telah tersedia

b. Ruang lingkup jelas dan sederhana

c. Dokumen reviu tersedia dan tersusun rapih

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Ruang lingkup jelas

b. Sudah ada rekomendasi dari Provinsi

Pemantauan RTP :

a. Petugas pemantauan memadai

b. Perangkat daerah paham atas kewajibannya

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Komitmen Pimpinan

2) Dukungan / komitmen dari pemilik risiko level Perangkat Daerah

3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Koordinasi secara berkala antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

Evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan RB tersedia

b. Tim sudah bekerja optimal

c. Dokumen rencana aksi telah dilegalkan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) **Dukungan dari Pimpinan**

2) **Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai**

3) **Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas**

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

3) Perubahan SOTK menyulitkan pengukuran capaian kinerja

Reviu LPPD :

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya terlambat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

Pemeriksaan Kinerja :

a. Pedoman pelaksana belum tersedia

b. Personil / petugas pemeriksa belum didiklatkan penugasan tersebut

c. Ruang lingkup berbenturan / beririsan dengan urusan pemerintah lainnya

d. Obyek pemeriksaan tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi karena alasan tertentu

Pemeriksaan NSPK :

a. Personil / petugas pemeriksa belum kompeten di bidangnya

b. Batas waktu pemeriksaan terbatas karena berbenturan waktunya dengan penugasan mandatory

SPM Triwulanan :

a. Aplikasi tidak mendukung kerja

b. Waktu yang diberikan pusat untuk APIP melakukan reviu berbarengan dengan waktu penginputan

c. Belum tersedia pedoman reviu dari pusat

Manajemen ASN :

a. Kesulitan memeriksa isi aplikasi karena akses terhadap aplikasi terbatas.

b. Dokumen yang direviu kebanyakan bersifat rahasia sehingga PD yang menangani urusan kepegawaian sedikit ragu menyerahkan ke tim pemeriksa

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Waktu pelaksanaan pengawasan singkat

b. Belum ada pedoman pelaksanaan

Pemantauan RTP :

Petugas pemantauan jumlah / kuantitas sedikit / belum optimal

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh MenpanRB sering mengalami *trouble*, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

Evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan evaluasi belum tersedia

b. Bukti dukung tidak tersedia

c. Pemahaman terkait pelaksanaan RB belum optimal

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Obrik telah merasa jenuh melakukan pemenuhan dokumen

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi AKIP

1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi

2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala.

Reviu LPPD :

1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri

2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun Kemendagri

3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala-kendala untuk menghasilkan solusi terbaik

Pemeriksaan Kinerja :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Melakukan entry meeting dengan obyek pemeriksaan

c. Melakukan ekspose atas temuan

Pemeriksaan NSPK :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Ruang lingkup dibuat lebih sederhana

SPM Triwulanan :

a. Intens / berkala berkoordinasi dengan Bangda

b. Bekerja sama dengan Bagian Pemerintah Setda Kab. Wonogiri

Manajemen ASN :

a. Melakukan wawancara langsung pada BKPSDM dengan menghadirkan seluruh operator

b. Membuat pakta integritas

SPM per urusan :

akan dilaksanakan di TW IV

Reviu kelembagaan BPBD :

Penugasan ini mandatory, untuk kedepannya penugasan jenis ini lebih intens dalam berkoordinasi dengan bagian organisasi Setda Kab. Wonogiri dan Setda Provinsi yang membidangi kelembagaan organisasi

Pemantauan RTP :

Buat aplikasi / *tool* yang mempermudah pelaksanaan pemantauan

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

akan dilaksanakan di TW IV

Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.

2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

Evaluasi RB perencanaan :

1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

Evaluasi internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulanan :

Rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi triwulanan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

2) Bekerja sama dengan operator yang menangani pelaporan LHKAN

<u>Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :</u>

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 01 Oktober 2026 PPUPD Ahli Muda ARIEF WULANDARI, S.P, M.P 198203272005012009

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **FREDY GUNTARA, S.H.**
Jabatan Pelapor : **PPUPD Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	Tersusunnya Laporan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP	Laporan	13	13	100.00	
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pra Reviu dan Reviu LPPD	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Pemeriksaan Ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM Triwulan II dan III	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Manajemen ASN	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Reviu Penerapan SPM per Urusan	Laporan	0	0	0.00	
					Jumlah Laporan Reviu Tipologi	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
					Perangkat Daerah pada BPBD					
3	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	Tersusunnya Laporan Pemantauan Implementasi RTP dan Pendampingan Penyusunan RR	Jumlah Laporan Pemantauan RTP Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Asistensi dan Evaluasi Penyusunan RR Strategis dan Operasional Tahun 2027	Laporan	0	0	0.00	
			4	Tersusunnya Laporan Pendampingan, Asistensi Maturitas SPIP	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	
5	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	Tersusunnya Laporan Evaluasi Internal RB	Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan Tahun 2026	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Evaluasi Internal RB Tahap Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2025 dan Triwulan I, II, III Tahun 2026	Laporan	3	3	100.00	
6	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	Tersusunnya Laporan Monitoring LHKAN	Jumlah Laporan Monitoring LHKAN	Laporan	1	1	100.00	

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
			7	Tersusunnya Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan dan Penilaian Madiri Zona Integritas	Laporan	2	2	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Evaluasi AKIP

1) Tata cara dan penyusunan Laporan telah dilengkapi dengan pedoman / regulasi yang memadai

2) Pra Evaluasi dilakukan reviu atas Dokumen LkJIP yang berkolaborasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

3) Pasca Evaluasi dilakukan Panel antar Tim maka tercipta keseragaman dalam penyusunan laporan

Reviu LPPD :

1) Kesesuaian pelaksanaan tahapan reviu dengan agenda kerja reviu LPPD

2) Kolaborasi / hubungan kerja yang baik dengan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Wonogiri.

Pemeriksaan Kinerja :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

Pemeriksaan NSPK :

a. SDM yang kompeten di bidang urusan pemerintahan

b. Telah dilaksanakan pengumpulan informasi awal

c. Obyek pemeriksaan sangat koorperatif

SPM Triwulanan :

a. Aplikasinya mendukung proses kerja pengawasan

b. Waktu penugasan mencukupi

c. Adanya pedoman pelaksanaan pengawasan

Manajemen ASN :

a. Panduan pelaksanaan reviu dari MCSP KPK telah tersedia

b. Ruang lingkup jelas dan sederhana

c. Dokumen reviu tersedia dan tersusun rapih

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Ruang lingkup jelas

b. Sudah ada rekomendasi dari Provinsi

Pemantauan RTP :

a. Petugas pemantauan memadai

b. Perangkat daerah paham atas kewajibannya

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Komitmen Pimpinan

2) Dukungan / komitmen dari pemilik risiko level Perangkat Daerah

3) Peningkatan Kompetensi pemilik risiko terkait SPIP

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Koordinasi secara berkala antara pihak APIP dengan Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

2) Ketepatan waktu Asesor Pemda menyelesaikan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3) Adanya Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tepat waktu dalam memberikan materi evaluasi

2) Tersedia aplikasi reviu dari Kemenpan

3) Kolaborasi yang baik dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

Evaluasi Internal RB Tahap pelaksanaan triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan RB tersedia

b. Tim sudah bekerja optimal

c. Dokumen rencana aksi telah dilegalkan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pelaksanaan monitoring telah dilengkapi peraturan / regulasi yang memadai

2) Bentuk Laporan sederhana

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Dukungan dari Pimpinan

2) Rutin dilaksanakan rapat koordinasi antara Tim Pembina dan Tim penilai

3) Semangat dari perangkat daerah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Evaluasi AKIP

1) Keterbatasan SDM APIP yang mengevaluasi

2) Pada saat evaluasi berlangsung terkadang laman resmi Perangkat Daerah terserang virus mengakibatkan proses evaluasi terhambat karena salah satu indikator penilaian akip adalah ketepatan waktu dalam mengunggah dokumen pada laman.

3) Perubahan SOTK menyulitkan pengukuran capaian kinerja

Reviu LPPD :

1) Regulasi terkait pelaksanaan LPPD terbitnya terlambat

2) Perangkat daerah kesulitan menyampaikan bukti dukung

3) Perangkat daerah tidak memiliki data yang diminta oleh Aplikasi e-LPPD

4) Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Wonogiri terlambat mengunggah dan mengisi data di Aplikasi e-LPPD karena Perangkat Daerah belum selesai menghitung angka capaian.

Pemeriksaan Kinerja :

a. Pedoman pelaksana belum tersedia

b. Personil / petugas pemeriksa belum di diklatkan penugasan tersebut

c. Ruang lingkup berbenturan / beririsan dengan urusan pemerintah lainnya

d. Obyek pemeriksaan tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi karena alasan tertentu

Pemeriksaan NSPK :

a. Personil / petugas pemeriksa belum kompeten di bidangnya

b. Batas waktu pemeriksaan terbatas karena berbenturan waktunya dengan penugasan mandatory

SPM Triwulanan :

a. Aplikasi tidak mendukung kerja

b. Waktu yang diberikan pusat untuk APIP melakukan reviu berbarengan dengan waktu penginputan

c. Belum tersedia pedoman reviu dari pusat

Manajemen ASN :

a. Kesulitan memeriksa Isi Aplikasi karena akses terhadap aplikasi terbatas

b. Dokumen yang direviu kebanyakan bersifat rahasia sehingga PD yang menangani urusan kepegawaian sedikit ragu menyerahkan ke tim pemeriksa.

SPM per urusan :

Belum terlaksana di TW III

Reviu kelembagaan BPBD :

a. Waktu pelaksanaan pengawasan singkat

b. Belum ada pedoman pelaksanaan

Pemantauan RTP :

Petugas pemantauan jumlah / kuantitas sedikiti / belum optimal

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

Belum terlaksana

Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Kurang anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Komitmen dari pemilik risiko maupun pimpinan tertinggi level perangkat daerah masih kurang

Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi :

1) Perangkat Daerah yang didampingi sebanyak 51 PD, namun Pendampingnya dari APIP SDMnya terbatas

2) Perubahan Regulasi terutamanya penentuan sektor yang diwajibkan informasi dari pengampu kegiatan telat

3) Komunikasi kurang berjalan lancar dengan pihak pengampu

4) Tidak tepat waktu pengiriman hasil Pelaksanaan Pendampingan ketika Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan :

1) Tim STU terlambat dalam melaksanakan monitoring

2) Aplikasi yang disediakan oleh MenpanRB sering mengalami *trouble*, sehingga evaluasi dilaksanakan secara manual.

Evaluasi Internal RB Tahap pelaksanaan triwulanan :

a. Pedoman pelaksanaan evaluasi belum tersedia

b. Bukti dukung tidak tersedia

c. Pemahaman terkait pelaksanaan RB belum optimal

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Pegawai terlambat dalam melaporkan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Obrik telah merasa jenuh melakukan pemenuhan dokumen

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Evaluasi AKIP

1) Peningkatan kompetensi APIP melalui Pelatihan/Diklat/Bimtek atau pelatihan dikantor sendiri guna pembaharuan ilmu/materi dan penyamaan persepsi

2) Pelaksanaan Panel dengan Tim lainnya untuk persamaan persepsi dan pembahasan permasalahan yang terjadi ketika pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala.

Reviu LPPD :

1) Komunikasi yang intensif dengan Provinsi dan Kemendagri

2) Pelaksanaan Bimbingan teknis dengan narsum dari Provinsi maupun Kemendagri

3) Pelaksanaan rutin rapat koordinasi pembahasan kendala-kendala untuk menghasilkan solusi terbaik

Pemeriksaan Kinerja :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Melakukan entry meeting dengan obyek pemeriksaan

c. Melakukan ekspose atas temuan

Pemeriksaan NSPK :

a. Membuat rencana pelatihan

b. Ruang lingkup dibuat lebih sederhana

SPM Triwulanan :

a. Intens / berkala berkoordinasi dengan Bangda

b. Bekerja sama dengan bagian Pemerintah Setda Kab. Wonogiri

Manajemen ASN :

a. Melakukan wawancara langsung pada BKPSDM dengan menghadirkan seluruh operator

b. Membuat pakta integritas

SPM per urusan :

akan dilaksankan di TW IV

Reviu kelembagaan BPBD :

Pengawasan ini mandatory, untuk kedepannya penugasan jenis ini lebih intens dalam berkoordinasi dengan bagian organisasi Setda Kab. Wonogiri dan Setda Provinsi yang membidangi kelembagaan organisasi

Pemantauan RTP :

Buat aplikasi / *tool* yang mempermudah pelaksanaan pemantauan

Penyusunan Register Risiko tahun 2027 :

akan dilaksanakan di TW IV

Pendampingan Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Usulan penambahan Anggaran untuk pelaksanaan FGD

2) Secara insentif/berkala dilakukan sosialisasi dengan narasumber pengampu kegiatan SPIP

Penjaminan Kualitas Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi :

1) Peningkatan kompetensi APIP ditingkatkan, dengan mengikuti pelatihan bersertifikasi untuk melakukan penugasan penjaminan kualitas.

2) Insentif komunikasi dengan pihak pengampu kegiatan SPIP terintegrasi

Evaluasi RB perencanaan :

1) Secara berkala dilakukan rapat koordinasi antara apip, tim STU dan OPD pengampu

2) Menyediakan Backup sarana prasana evaluasi pengganti aplikasi Menpan

Evaluasi Internal RB Tahap pelaksanaan triwulanan :

Rapat koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi triwulanan

Monitoring Laporan LHKAN :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

2) Bekerja sama dengan operator yang menangani pelaporan LHKAN

Pendampingan pelaksanaan Zona Integritas :

1) Secara berkala melakukan sosialisasi

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710124 199903 1 002	Wonogiri, 01 Oktober 2026 PPUPD Ahli Pertama FREDY GUNTARA, S.H. 199112132025061001

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **GUSTINA DWI LESTIANI, S.Ak.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	16	177.78	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	9	9	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan III. Percepatan pelaksanaan monev TL Hasil Evaluasi AKIP yang menjadikan realisasi melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja triwulan III.

Reviu Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP dapat diselesaikan sesuai target di Triwulan II.

Pengawasan Desa :

Penundaan pelaksanaan pengawasan Desa di Triwulan III karena diprioritaskan untuk melaksanakan pengawasan pemenuhan MCSP KPK.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Reviu Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP selesai sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai PKPT Perubahan, Pengawasan Desa dilaksanakan pada Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **GUSTINA DWI LESTIANI, S.Ak.** **199806292025062004**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **DICKY SATRIA, S.E.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	16	177.78	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	9	9	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan III. Percepatan pelaksanaan monev TL Hasil Evaluasi AKIP yang menjadikan realisasi melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja triwulan III.

Reviu Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP dapat diselesaikan sesuai target di Triwulan II.

Pengawasan Desa :

Penundaan pelaksanaan pengawasan Desa di Triwulan III karena diprioritaskan untuk melaksanakan pengawasan pemenuhan MCSP KPK.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Reviu Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP selesai sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai PKPT Perubahan, Pengawasan Desa dilaksanakan pada Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **DICKY SATRIA, S.E.** **199304142020121002**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **AGUS PRIYANTI, A.Md**
Jabatan Pelapor : **Auditor Penyelia**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	16	177.78	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	9	9	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan III. Percepatan pelaksanaan monev TL Hasil Evaluasi AKIP yang menjadikan realisasi melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja triwulan III.

Reviu Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP dapat diselesaikan sesuai target di Triwulan II.

Pengawasan Desa :

Penundaan pelaksanaan pengawasan Desa di Triwulan III karena diprioritaskan untuk melaksanakan pengawasan pemenuhan MCSP KPK.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Reviu Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP selesai sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai PKPT Perubahan, Pengawasan Desa dilaksanakan pada Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Penyelia** **AGUS PRIYANTI, A.Md** **198108132011012004**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **NENI SAPTANINGRUM, S.Sos**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Madya**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	0	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	16	177.78	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	9	9	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

Reviu Laporan Kinerja :

Percepatan pelaksanaan evaluasi AKIP mengingat deadline penyelesaian atas evaluasi adalah di Bulan Juni 2026 sehingga realisasinya selesai di Bulan Mei 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 rencana pelaksanaan di Triwulan IV.

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan arahan pimpinan serta komitmen tim sehingga dapat terlaksana pada Triwulan III. Percepatan pelaksanaan monev TL Hasil Evaluasi AKIP yang menjadikan realisasi melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan kinerja triwulan III.

Reviu Laporan Kinerja :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan Evaluasi AKIP dapat diselesaikan sesuai target di Triwulan II.

Pengawasan Desa :

Penundaan pelaksanaan pengawasan Desa di Triwulan III karena diprioritaskan untuk melaksanakan pengawasan pemenuhan MCSP KPK.

Telaah Intern Antar Bidang :

Tidak ada faktor penghambat karena sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, belum ada rencana pelaksanaannya di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar dan melebihi target.

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sehingga pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu di Triwulan III dapat berjalan dengan lancar

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah :

Sesuai perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026, rencana pelaksanaannya adalah di Triwulan III

Reviu Laporan Kinerja :

Pelaksanaan evaluasi AKIP selesai sesuai dengan yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Pengawasan Desa :

Sesuai PKPT Perubahan, Pengawasan Desa dilaksanakan pada Triwulan IV.

Telaah Intern Antar Bidang :

Pelaksanaan reviu antar tim sesuai yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan :

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan berikutnya menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu :

Melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 05 Oktober 2026** **Auditor Ahli Madya** **NENI SAPTANINGRUM, S.Sos** **197104061996032003**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **LASTO PAMUNGKAS**
Jabatan Pelapor : **Pengelola Umum Operasional**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MURNI HASTUTI, S.E., M.M**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Melayani antar jemput pegawai dan melayani transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas	Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/ pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas	Laporan	9	9	100.00	
			2	Memeriksa dan menyiapkan perangkat kendaraan dinas agar selalu siap pakai	Kendaraan dinas yang selalu siap pakai	Laporan	9	9	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan beberapa faktor pendukungnya :

- Ketersediaan kendaraan dinas dalam kondisi operasional yang baik.
- Jadwal kegiatan kedinasan relatif terencana sehingga penggunaan kendaraan dapat diatur.
- Dukungan pengemudi (driver) yang disiplin dan memahami rute serta kebutuhan pelayanan.
- Ketersediaan anggaran operasional (BBM dan pemeliharaan ringan) yang mencukupi.
- Koordinasi internal yang berjalan baik antar bagian pengguna kendaraan.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan faktor pendukungnya :

- Pelaksanaan pemeliharaan rutin kendaraan (servis berkala).
- Kedisiplinan pengemudi dalam merawat kendaraan setelah digunakan.
- Ketersediaan anggaran pemeliharaan kendaraan.
- Kebiasaan pemeriksaan kendaraan secara berkala.
- Dukungan administrasi dalam pencatatan kondisi kendaraan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan beberapa faktor penghambatnya :

- Potensi benturan jadwal penggunaan kendaraan jika kegiatan meningkat.
- Keterbatasan jumlah kendaraan dibanding kebutuhan pada waktu tertentu.
- Risiko gangguan teknis kendaraan secara tiba-tiba.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan faktor penghambatnya :

- Usia kendaraan yang sudah tua berpotensi mengalami kerusakan.
- Keterbatasan waktu untuk perawatan jika kendaraan sering digunakan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Terlaksananya pelayanan antar jemput pejabat/pegawai dan transportasi lainnya yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas dengan tindak lanjutnya :

- Menyusun dan memperketat sistem penjadwalan kendaraan dinas.
- Melakukan pengecekan rutin kendaraan sebelum digunakan (pre-check).
- Menyusun skala prioritas penggunaan kendaraan untuk kegiatan kedinasan.
- Mengoptimalkan koordinasi antar pengguna kendaraan melalui administrasi peminjaman.
- Mengantisipasi kebutuhan tambahan kendaraan (jika diperlukan) melalui perencanaan ke depan.

Kendaraan dinas yang selalu siap pakai dengan tindak lanjutnya :

- Menjadwalkan servis berkala secara konsisten sesuai standar.
- Melakukan pemeriksaan harian/mingguan terhadap kondisi kendaraan.
- Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan dan penggantian kendaraan.
- Meningkatkan kedisiplinan penggunaan kendaraan sesuai prosedur.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian MURNI HASTUTI, S.E., M.M 197507102009032003	Wonogiri, 05 Oktober 2026 Pengelola Umum Operasional LASTO PAMUNGKAS 19751216202521101 6

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **SARWANTO**
Jabatan Pelapor : **Pengelola Umum Operasional**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MURNI HASTUTI, S.E., M.M**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	3	100.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pemeliharaan Mebel
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pemeliharaan Mebel
Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Mebel sampai dengan Triwulan III

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tidak faktor penghambat dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan III Tahun 2026

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pemeliharaan Mebel
Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Mebel di Triwulan IV Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Triwulan IV Tahun 2026

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian MURNI HASTUTI, S.E., M.M 197507102009032003	Wonogiri, 05 Oktober 2026 Pengelola Umum Operasional SARWANTO 197208172025211025

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	1	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	10	111.11	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	12	10	83.33	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

-

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta system pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Intern

Adanya percepatan pelaksanaan pengawasan desa dan monitoring tindak lanjut sehingga telaah sejawat intern belum dapat terlaksana di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Adanya percepatan pengawasan desa dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sehingga terjadi keterlambatan pengawasan dengan tujuan tertentu sampai dengan triwulan III

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Reviu Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

Kerjasama Pengawasan Internal

Melaksanakan telaah sejawat intern di Triwulan IV

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 02 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **WIWIT KARYANTI, S.Akt., M.Acc.** **198301242006042011**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	1	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	10	111.11	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	12	10	83.33	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Internal

-

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Intern

Adanya percepatan pelaksanaan pengawasan desa dan monitoring tindak lanjut sehingga telaah sejawat intern belum dapat terlaksana di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Adanya percepatan pengawasan desa dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sehingga terjadi keterlambatan pengawasan dengan tujuan tertentu sampai dengan triwulan III

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Reviu Laporan Kinerja Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan IV Pengawasan Desa Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV Kerjasama Pengawasan Internal Melaksanakan telaah sejawat intern di Triwulan IV Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 02 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **OCTAVIA ANDARESTA HERDININGSIH, S.Ak** **199810142022032007**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **MUTHIA NOOR SHAFA, S.E.**
Jabatan Pelapor : **Auditor Ahli Pertama**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MARDIANTO, SE**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **INSPEKTUR**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1	Tersusunnya Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang Disusun	Laporan	2	2	100.00	
2	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Tersusunnya Laporan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi AKIP yang disusun	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	3	Tersusunnya Laporan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang Disusun	Laporan	3	3	100.00	
4	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	4	Tersusunnya Laporan Telaah Intern Antar Bidang	Jumlah Laporan Hasil Telaah Intern Antar Tim yang Disusun	Laporan	1	0	0.00	
5	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	Tersusunnya Dokumen Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Disusun	Dokumen	9	10	111.11	
6	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	Tersusunnya Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Disusun	Laporan	12	10	83.33	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 sehingga pelaksanaan telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Arahan pimpinan dan komitmen tim dalam melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026

Kerjasama Pengawasan Intern

-

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu, didukung dengan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara APIP dan perangkat daerah. Selain itu, ketersediaan data, dokumen pendukung, serta sistem pemantauan yang memadai turut mempercepat proses monitoring dan penyelesaian tindak lanjut

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pelaksanaan rapat rencana operasional bulanan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 serta arahan pimpinan dan komitmen tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencananya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Reviu Laporan Kinerja

Tidak ada faktor penghambat di Triwulan III karena target telah terselesaikan 100% di Triwulan II

Pengawasan Desa

Tidak ada faktor penghambat yang krusial sampai dengan Triwulan III sehingga dapat tercapai sesuai target rencananya

Kerjasama Pengawasan Intern

Adanya percepatan pelaksanaan pengawasan desa dan monitoring tindak lanjut sehingga telaah sejawat intern belum dapat terlaksana di Triwulan III

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Belum semua laporan pengawasan siap untuk dilakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasannya dan tidak semua laporan hasil pengawasan (LHP) yang sudah jadi membutuhkan monitoring tindak lanjut karena tindak lanjutnya telah terselesaikan saat LHP diterbitkan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Adanya percepatan pengawasan desa dan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sehingga terjadi keterlambatan pengawasan dengan tujuan tertentu sampai dengan triwulan III

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Reviu Laporan Kinerja

Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP di Triwulan IV

Pengawasan Desa

Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta melanjutkan pelaksanaan pengawasan desa lainnya yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

Kerjasama Pengawasan Internal

Melaksanakan telaah sejawat intern di Triwulan IV

Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Melanjutkan pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan di Triwulan IV menyesuaikan kondisi real jika memang dibutuhkan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Melanjutkan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah menjadi target dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 di Triwulan IV

INSPEKTUR **MARDIANTO, SE** **19710124 199903 1 002**	**Wonogiri, 02 Oktober 2026** **Auditor Ahli Pertama** **MUTHIA NOOR SHAFA, S.E.** **199908032025062005**

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : BAMBANG MAHESTHI WIBOWO, S.Kom
Jabatan Pelapor : Pranata Komputer Ahli Muda
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : MARDIANTO, SE
Jabatan Pimpinan Pelapor : INSPEKTUR

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Terwujudnya Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	9	9	100.00	
					Jumlah Laporan Pembayaran TPP	Laporan	9	9	100.00	
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Terwujudnya Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)	Laporan	9	9	100.00	
3	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Terlaksananya Pemeliharaan Website	Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Aplikasi	1	1	100.00	
			4	Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut SIMHP	Jumlah Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Aplikasi	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Telah terealisasi sesuai targetnya di Triwulan III atas penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Bulan Januari sampai dengan Bulan September karena tersedianya sistem pembayaran gaji terintegrasi.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Telah terealisasi sesuai dengan targetnya di Triwulan III atas laporan pembayaran TPP bulan Januari sampai dengan September karena Mekanisme pembayaran TPP yang telah baku.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Telah tercapai sesuai dengan targetnya di Triwulan III atas laporan fungsional keuangan bulan Januari sampai dengan karena Sistem pelaporan keuangan rutin berjalan.

Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala

Meskipun belum ada targetnya di Triwulan I namun secara realisasi sudah dilakukan pemeliharaan secara rutin dengan beberapa faktor pendukungnya sebagai berikut :

Website/aplikasi telah tersedia dan dapat digunakan sebagai media informasi.

- **Tersedianya sarana prasarana pendukung (server, jaringan internet).**
- **Adanya admin/pengelola website.**
- **Dukungan kebijakan keterbukaan informasi publik.**

Jumlah Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Berkala

- **Telah tersedianya aplikasi monitoring tindak lanjut yang digunakan dalam mendukung kegiatan pengawasan.**
- **Adanya dukungan infrastruktur teknologi informasi (server, jaringan, dan perangkat pendukung lainnya).**
- **Tersedianya admin atau pengelola aplikasi yang memahami alur kerja sistem.**
- **Adanya kebutuhan organisasi terhadap data tindak lanjut yang akurat dan ter-update sehingga mendorong pemeliharaan aplikasi.**

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Potensi keterlambatan administrasi karena adanya perubahan data pegawai sehingga perlu dilakukan penyesuaiannya di penyediaan gaji dan tunjangan ASN bulan berikutnya.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Belum ditemukan faktor penghambatya karena sistem pencatatan kinerja telah tersedia untuk dasar pemberian TPP.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Keterlambatan input transaksi dapat menghambat proses penyusunan laporan fungsional bulanan namun tidak sampai menjadikan keterlambatan penyusunan laporan fungsional keuangan di Triwulan III.

Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi sebagai berikut :

Update konten belum dilakukan secara rutin.

- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan website.
- Belum adanya jadwal pemeliharaan yang terstruktur.
- Ketergantungan pada pihak tertentu dalam pengelolaan teknis.

Jumlah Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Berkala

- Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pemeliharaan aplikasi sehingga ketergantungan hanya pada SDM tertentu.
- Belum adanya jadwal pemeliharaan berkala yang terstruktur dan terdokumentasi.
- Potensi gangguan teknis seperti error sistem, downtime server, atau masalah jaringan.
- Update atau perubahan kebutuhan pengguna yang belum langsung diakomodasi dalam aplikasi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pembaruan data ASN secara berkala dengan koordinasi dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Koordinasi dengan BPKAD dalam hal kesesuaian dan ketepatan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulannya.

Jumlah Laporan Pembayaran TPP

Melanjutkan pelaksanaan pembayaran TPP di Triwulan IV

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan IV untuk laporan fungsional keuangan bulan Oktober, November dan Desember.

Jumlah Website yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala

Menyusun jadwal pemeliharaan dan update konten secara berkala.

- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dan keamanan website.

Jumlah Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut Dilakukan Pemeliharaan Berkala

- Menyusun dan menetapkan jadwal pemeliharaan aplikasi secara berkala.
- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pengelolaan aplikasi.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja aplikasi, termasuk keamanan dan keandalan sistem.
- Mendokumentasikan setiap kegiatan pemeliharaan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan.

INSPEKTUR MARDIANTO, SE 19710724 199903 1 002	Wonogiri, 02 Oktober 2026 Pranata Komputer Ahli Muda RAMBANG MAHESTHI WIBOWO, S.Kom 19841209200903 1003

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : BAYU SIDIK PURNOMO, S.E
Jabatan Pelapor : Penelaah Teknis Kebijakan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)	Dokumen	2	3	150.00	
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan	Laporan	7	7	100.00	
3	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	100.00	
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)	Laporan	7	7	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- **Perencanaan jadwal kegiatan telah disusun sesuai tahapan siklus penganggaran.**
- **Ketersediaan pedoman penyusunan dokumen penganggaran.**

Sehingga telah disusun KAK tahun 2027 serta RKA Perubahan 2026 dan Penetapan 2027

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Target sampai dengan Triwulan III telah terpenuhi atas pengumpulan laporan realisasi keuangan di bulan Maret s.d Juni dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- **Sistem pelaporan rutin telah berjalan.**
- **Ketersediaan data keuangan.**

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Telah terselesaikan di Triwulan I atas penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025 karena Data keuangan telah tersedia.

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Telah tercapai sesuai dengan targetnya sampai dengan Triwulan III atas laporan fungsional keuangan bulan Maret s.d September karena Sistem pelaporan keuangan rutin berjalan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)
Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat tercapai sesuai targetnya di Triwulan III
Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan
Keterlambatan input data oleh unit kerja. Namun sampai dengan Triwulan III ini, hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporannya.
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Proses koordinasi lintas bidang yang membutuhkan ketelitian tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Namun hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporan keuangan akhir tahun ke BPKAD di Triwulan I.
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)
Keterlambatan input transaksi dapat menghambat proses penyusunan laporan fungsional bulanan namun tidak sampai menjadikan keterlambatan penyusunan laporan fungsional keuangan sampai dengan Triwulan III.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- **Mempersiapkan data dukung dan bahan awal penyusunan.**
- **Koordinasi awal dengan BPKAD/Bappeda terkait jadwal dan kebijakan penganggaran.**

Untuk penyusunan DPPA Tahun 2026 dan DPA Tahun 2027

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Tindak lanjutnya di triwulan berikutnya adalah :

- **Penegasan batas waktu pelaporan ke semua sub bagian dan bidang.**
- **Monitoring berkala atas kepatuhan pelaporan.**

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Sidah tidak ada tindak lanjutnya di triwulan berikutnya karena proses penyusunan telah terselesaikan di Triwulan I

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Laporan Fungsional Keuangan Bulanan)

Melanjutkan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan bulanan di Triwulan IV untuk laporan fungsional keuangan bulan Oktober, November dan Desember

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan **PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M** **197312271992032002**	**Wonogiri, 02 Oktober 2026** **Penelaah Teknis Kebijakan** **BAYU SIDIK PURNOMO, S.E** **199403272020121003**

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : MARDIONO, S.E
Jabatan Pelapor : Pengolah Data dan Informasi
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : PADMI FUJIRASTUTI,S.IP., M.M
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Terdokumentasinya Laporan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)	Laporan	28	28	100.00	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)	Laporan	34	34	100.00	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)	Laporan	89	89	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya sampai dengan Triwulan III dengan beberapa faktor pendukungnya yaitu :

- **Telah tersusunnya LHP Audit dan Pemeriksaan oleh Bidang sebagai bahan utama untuk didokumentasikan.**
- **Tersedianya sistem atau mekanisme administrasi pencatatan dan penyimpanan dokumen (baik manual maupun digital).**
- **Adanya petugas/pegawai yang menangani fungsi administrasi dan kearsipan.**
- **Format dan tata naskah dinas yang telah baku sehingga memudahkan proses pencatatan dan pengarsipan.**

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya sampai dengan Triwulan III dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- **LHP Reviu telah disusun oleh Bidang sebagai dasar kegiatan dokumentasi.**
- **Adanya alur administrasi yang mengatur penyerahan dokumen dari Bidang ke bagian pengelola.**
- **Ketersediaan sarana penyimpanan dokumen (lemari arsip maupun media digital).**
- **Adanya kebiasaan pencatatan dokumen masuk/keluar dalam register atau aplikasi.**

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

Telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya sampai dengan Triwulan III dengan beberapa faktor pendukungnya sebagai berikut :

- **Tersedianya berbagai jenis LHP pengawasan lainnya (monitoring, evaluasi, dll) dari Bidang.**
- **Fleksibilitas dalam bentuk dan jenis dokumen sehingga memudahkan pengumpulan.**
- **Adanya dukungan administrasi umum dalam pengelolaan dokumen.**
- **Ketersediaan tempat dan media penyimpanan arsip.**

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

Meski telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun terkadang masih terjadi kendala/hambatan seperti :

- **Keterlambatan penyerahan LHP dari Bidang kepada pengelola administrasi.**
- **Penumpukan dokumen pada waktu tertentu sehingga proses pencatatan dan penyimpanan tidak langsung dilakukan.**
- **Belum optimalnya sistem pengarsipan digital (misalnya penamaan file, folder, atau indexing belum seragam)**

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi seperti :

- **Dokumen hasil reviu sering mengalami perbaikan sehingga memperlambat proses dokumentasi final.**
- **Kurangnya ketepatan waktu dalam penyampaian dokumen dari Bidang.**
- **Belum tertibnya pencatatan dalam register atau sistem administrasi.**
- **Risiko duplikasi atau kehilangan dokumen apabila tidak segera didokumentasikan.**

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

Meskipun telah tercapai sesuai dengan rencana targetnya namun masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang terkadang terjadi sebagai berikut :

- **Variasi bentuk dokumen menyebabkan belum seragamnya pola pencatatan dan penyimpanan.**
- **Tidak semua hasil pengawasan lainnya langsung diserahkan untuk didokumentasikan.**
- **Potensi keterlambatan dokumentasi karena volume dokumen yang cukup banyak.**

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Audit/Pemeriksaan)

- **Meningkatkan koordinasi dengan Bidang agar LHP yang telah selesai segera diserahkan untuk didokumentasikan.**

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Reviu)

- **Menegaskan mekanisme bahwa hanya dokumen final yang didokumentasikan.**
- **Meningkatkan kedisiplinan pencatatan dalam buku register atau aplikasi.**
- **Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen sebelum disimpan.**

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Terdokumentasi (Pengawasan Lainnya)

- **Mendorong ketepatan waktu penyampaian dokumen dari Bidang.**
- **Melakukan monitoring rutin terhadap kelengkapan dokumentasi.**

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan **PADMI FUJIHASTUTI,S.IP., M.M** **197212271992032002**	**Wonogiri, 02 Oktober 2026** **Pengolah Data dan Informasi** **MARDIONO, S.E** **197012183014061002**

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : **WIYADI, S.E**
Jabatan Pelapor : **Pengelola Layanan Operasional**
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : **MURNI HASTUTI, S.E., M.M**
Jabatan Pimpinan Pelapor : **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	2	200.00	
2	IKM Inspektorat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	4	5	125.00	
3	IKM Inspektorat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Unit	3	3	100.00	
4	IKM Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	100.00	
5	IKM Inspektorat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	1	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Ketersediaan anggaran dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya seperti laptop dan printer

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Ketersediaan anggaran dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Triwulan III Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tidak ada faktor penghambat dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Mebel
Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Mebel sampai dengan Triwulan III

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tidak ada faktor penghambat dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan triwulan III Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tidak faktor penghambat dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 karena belum ada realisasi

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Triwulan IV Tahun 2026

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Melanjutkan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan di Triwulan IV Tahun 2026

Pemeliharaan Mebel
Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Mebel di Triwulan IV Tahun 2026

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Triwulan IV Tahun 2026

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Melanjutkan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya di Triwulan IV Tahun 2026

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian MURNI HASTUTI, S.E., M.M 197507102009032003	Wonogiri, 05 Oktober 2026 Pengelola Layanan Operasional WIYADI, S.E 197010132008011004

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI
TAHUN 2026

Nama Pejabat yang melaporkan Capaian Kinerja : ENI SUSANTI, S.E
Jabatan Pelapor : Penelaah Teknis Kebijakan
Nama Pimpinan yang Melakukan Monev : PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M
Jabatan Pimpinan Pelapor : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIVIDU TRIWULAN KE -3

No	Sasaran Kegiatan Atasan	Indikator	Kinerja							
			No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan 3	Realisasi	(%)	Keterangan
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, PPRG dan RTP)	Dokumen	2	2	100.00	
					Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)	Dokumen	3	3	100.00	
					Jumlah Dokumen PKPT	Dokumen	1	1	100.00	
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LKjIP yang Disusun	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD	Laporan	2	2	100.00	
					Jumlah Laporan Penilaian Mandiri SPIP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Monitoring RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan	Laporan	4	4	100.00	
					Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan	Laporan	9	9	100.00	
					Jumlah Laporan Realisasi RTP	Laporan	1	1	100.00	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan	Laporan	9	9	100.00	
					Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan	Data	9	9	100.00	
					Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan	Data	9	9	100.00	

B. FAKTOR PENDUKUNG

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, PPRG dan RTP)

Terealisasi sesuai targetnya s.d Triwulan III atas penyusunan dokumen perubahan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2026 untuk penyesuaian SOTK dengan faktor pendukungnya adalah :

- **Adanya penyesuaian regulasi (Perbup SOTK baru).**
- **Ketersediaan data risiko dan RTP sebelumnya.**

serta telah disusunnya Dokumen Renja atas Perubahan Renja Tahun 2026 dan Penetapan Renja Tahun 2027

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- **Perencanaan jadwal kegiatan telah disusun sesuai tahapan siklus penganggaran.**
- **Ketersediaan pedoman penyusunan dokumen penganggaran.**

Sehingga telah disusun KAK tahun 2027 serta RKA Perubahan 2026 dan Penetapan 2027

Jumlah Dokumen PKPT

Faktor pendukungnya adalah kerangka acuan penyusunan PKPT telah tersedia dan telah disusun PKPT Perubahan Tahun 2026 atas penerbitan Pedoman MCSP di Triwulan III

Jumlah Laporan LKjIP yang Disusun

- **Data kinerja telah tersedia dari tahun sebelumnya.**
- **Dibentuknya Tim penyusun LKjIP.**

Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD

- **Pedoman penyusunan sudah jelas.**
- **Data capaian kinerja daerah tersedia.**

Jumlah Laporan Penilaian Mandiri SPIP

Telah terlaksana penilaian mandiri SPIP melalui kertas kerja penilaian mandiri SPIP dengan faktor pendukungnya adalah Rencana pelaksanaan yang telah disusun (termasuk sosialisasi dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah).

Jumlah Laporan Monitoring RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Target di Triwulan I telah terpenuhi atas penyusunan RB Tahap Perencanaan dengan faktor pendukungnya adalah :

- **Komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**
- **Ketersediaan dokumen rencana aksi.**

Kemudian target di Triwulan II telah terpenuhi dengan penyusunan laporan revisi hasil evaluasi tahap perencanaan serta monitoring implementasinya di Triwulan I dan II

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Target sampai dengan Triwulan III telah terpenuhi atas pengumpulan laporan kinerja bulan Januari - September dengan faktor pendukungnya sebagai berikut :

- Sistem pelaporan rutin telah berjalan.
- Ketersediaan data kinerja dan keuangan.

Jumlah Laporan Realisasi RTP

- Tersedianya dokumen pendukung atas implementasi RTP Semester I tahun 2026 sehingga dapat terselesaikan targetnya di Triwulan III
- pelaksanaan monitoring implementasi RTP setiap bulan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan

Terealisasi sesuai targetnya s.d Triwulan III dengan faktor pendukungnya adalah Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rapat rutin setiap bulannya.

Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan

Telah terealisasi sesuai targetnya sampai dengan Triwulan III atas penyusunan Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan di Bulan Januari s.d September karena Sistem pencatatan aktivitas pengawasan telah tersedia.

Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan

Dukungan sistem administrasi keuangan.

C. FAKTOR PENGHAMBAT

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, PPRG dan RTP)

Tidak ada faktor penghambat yang krusial dalam penyesuaian struktur organisasi dan pemetaan risiko baru dalam Perubahan Dokumen RTP Tahun 2026 yang terlaksana di Triwulan I dan penyusunan Dokumen Renja atas Perubahan Renja Tahun 2026 dan Penetapan Renja Tahun 2027 di Triwulan III.

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan sehingga dapat terrapai sesuai targetnya di Triwulan III

Jumlah Dokumen PKPT

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan

Jumlah Laporan LKjIP yang Disusun

Keterlambatan pengumpulan data dari beberapa unit kerja. Namun hal itu tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan dokumen LKjIP ke Bagian Organisasi.

Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD

Tidak ada faktor penghambat yang krusial karena pedoman sudah jelas dan telah dilakukan sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta pendampingan dalam penyusunannya oleh Bagian Pemerintahan dan Inspektorat.

Jumlah Laporan Penilaian Mandiri SPIP

Indikator penilaian yang bias sehingga dokumen pendukung yang disertakan bisa berbeda sesuai sudut pandang pelaksana yang mengisi penilaian mandiri tersebut. Hal ini menjadi penghambat dapat penyelesaian jika terjadi dua sudut pandang yang berbeda antara pelaksana penilaian mandiri SPIP

Jumlah Laporan Monitoring RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Penyesuaian rencana aksi RB baru di Tahun 2026 sehingga diperlukan waktu untuk dilakukan pembahasan dan koordinasi dengan bidang terkait (lintas bidang).

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Keterlambatan input data oleh unit kerja. Namun sampai dengan Triwulan III ini, hal ini tidak sampai menjadikan keterlambatan pengumpulan laporannya.

Jumlah Laporan Realisasi RTP

Tidak ada faktor penghambat yang signifikan

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan

Penyesuaian jadwal kegiatan pegawai. Namun hal ini tidak sampai menjadikan rapat operasional bulanan menjadi dibatalkan atau tidak terlaksana.

Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan

Ketepatan waktu input data karena keterbatasan SDM dengan 1 pelaksana saja.

Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan

Keterlambatan pelaporan realisasi oleh pelaksana kegiatan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renja, PPRG dan RTP)

Tindak lanjutnya di Triwulan IV adalah menyelesaikan target yang belum terpenuhi terkait penyusunan dokumen PPRG Tahun 2027

Jumlah Dokumen Penganggaran yang Disusun (KAK, RKA dan DPA)

- **Mempersiapkan data dukung dan bahan awal penyusunan.**
- **Koordinasi awal dengan BPKAD/Bappeda terkait jadwal dan kebijakan penganggaran.**

Untuk penyusunan DPPA Tahun 2026 dan DPA Tahun 2027

Jumlah Dokumen PKPT

- **Menyiapkan data prioritas pengawasan berbasis risiko.**
- **Koordinasi awal dengan semua bidang.**

Jumlah Laporan LKjIP yang Disusun

Tindak lanjutnya adalah melakukan evaluasi kinerja yang telah dituangkan dalam LKjIP untuk dilakukan perbaikan serta menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi AKIP dari auditor.

Jumlah Laporan LKPJ dan LPPD

Sudah tidak ada lagi tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya karena data dan dokumen yang dikumpulkan sudah dinilai sesuai oleh reviuer di Triwulan I

Jumlah Laporan Penilaian Mandiri SPIP

Sudah tidak ada tindak lanjutnya di Triwulan III karena telah terselesaikan di Triwulan II atas penilaian mandiri SPIP nya

Jumlah Laporan Monitoring RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan

Tindak lanjutnya di triwulan berikutnya adalah melakukan monitoring implementasi RB atas rencana aksi yang telah disusun di Triwulan III dan IV

Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Bulanan

Tindak lanjutnya di triwulan berikutnya adalah :

- **Penegasan batas waktu pelaporan ke semua sub bagian dan bidang.**
- **Monitoring berkala atas kepatuhan pelaporan.**

Jumlah Laporan Realisasi RTP

Tindak lanjutnya di Triwulan berikutnya adalah :

- **Monitoring pelaksanaan RTP secara internal seperti yang telah dilaksanakan di Triwulan I - III.**
- **Persiapan data dan dokumen pendukung untuk laporan Semester II yang telah dimulai sejak di Triwulan III s.d IV**

Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Rencana Operasional Bulanan

Tindak lanjutnya adalah melanjutkan pelaksanaannya di Triwulan IV untuk kelancaran operasional setiap bulannya.

Jumlah Data Rekap Realisasi Aktivitas Pengawasan

Tindak lanjutnya adalah :

- **Peningkatan disiplin pencatatan.**

- Validasi data secara berkala oleh auditor dan PPUPD sebagai pelaksana aktivitas pengawasan.

Jumlah Data Rekap Realisasi Penggunaan Anggaran Aktivitas Pengawasan

- Penguatan koordinasi dengan bendahara.
- Monitoring realisasi anggaran secara rutin.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dag Keuangan PADMI PUJIHASTUTI,S.IP., M.M 197212271992032002	Wonogiri, 02 Oktober 2026 Penelaah Teknis Kebijakan ENI SUSANTI, S.E 198911162020122001

© 2026 — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang